



LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat kami selesaikan tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama Tahun 2021 atau tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.



Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Painan, Maret 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan good governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan dipertanggungjawabkan.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Transparan.

Pencapaian Kinerja untuk 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 99,65%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 1 : Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan							
Tujuan 1 : Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi							
1.1.1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1	Penilaian LKD (opini BPK)	tanpa satuan	WTP	WTP	100
		2	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	tanpa satuan	B (68,00)	B (66,88)	98.35
		3	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3209	100
		4	Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	3 (3,0057)	3 (3,0000)	99.81
1.1.2	Meningkatnya kapasitas birokrasi	1	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3.34	104.38
		2	Indeks Profesionalitas	tanpa satuan	57	48.78	85.58



		ASN					
1.1.3	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	1	Kategori keterbukaan terhadap informasi publik	tanpa satuan	93	97	104.30
		2	Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	80	83.65	104.56
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 1							99.65

MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Pencapaian Kinerja untuk 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 2 sebesar 97,79%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 2

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat							
Tujuan 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat							
2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	7	112.50
		2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	100	172	28.00
		3	Prevalensi stunting	persen	11.6	12.3	94.00
		4	Angka kesakitan	persen	16.28	16.57	98.00
2.1.2	Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat	1	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	75	64.7	86.27
Tujuan 2 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat							
2.2.1	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	1	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	52.54	65.28	124.25



2.2.2	Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	1	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	86.5	81.70	94.45
		2	Pengeluaran per kapita	Rp./org/thn	9,325,000	9,270,000	100.59
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 2							97.79

MISI 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Pencapaian Kinerja untuk 5 (lima) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 252,22%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah							
Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan dan ekonomi secara berkelanjutan							
3.1.1	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	1	Nilai investasi swasta dan masyarakat	juta Rp.	200,000,000,000	1,767,753,324,797	883.88
3.1.2	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	1	Nilai PDRB sektor Pertanian (ADHK)	Triliun Rp.	3.55	3.60	101.41
		2	Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	703.61	725.44	103.10
3.1.3	Menurunnya pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka	persen	6.93	5.97	86.15
3.1.4	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1	Persentase jalan kabupaten kondisi	persen	29.55	30.78	104.16
		2	Rasio konektivitas	persen	55	55	100.00
		3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59.05	59.13	100.14
3.1.5	Terjaminnya kelestarian lingkungan	1	Indek kualitas lingkungan	tanpa satuan	86.74	75.8	87.39
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 3							252.22

MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 4 sebesar 63,61%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Cukup** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 4

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan							
Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat							
4.1.1	Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia	1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1,000,000	344,297	34.43
		2	Lama tinggal wisatawan	hari	1.25	1.25	100.00
4.1.2	Berkembangnya ekonomi kreatif	1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	12	7.2	60.00
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 4							63.61

MISI 5 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Pencapaian Kinerja untuk 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 5 sebesar 117,49%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 5

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
Tujuan 1 : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas							
5.1.1	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	1	Harapan lama sekolah	tahun	13	13.33	99.78
		2	Rata-rata lama sekolah	tahun	8.29	8.27	99.76
5.1.2	Meningkatnya daya saing pendidikan	1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat propinsi	orang	4	3	75.00
		2	Indek Pembangunan literasi	tanpa satuan	5.9258	5.9258	100.00
Tujuan 2 : Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
5.2.1	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	1	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96	63.00	65.35
		2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah dimesjid/musholla	tanpa satuan	Rendah (≤ 10 orang)	Tinggi (≥ 30 orang)	300
5.2.2	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	10	100.00
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 5							117.49

MISI 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenang dan Dinamis

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 5 sebesar 87,16%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori *Baik*. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel. 6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 6

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 6 : Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan dinamis							
Tujuan 1 : Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman							
6.1.1	Terwujudnya keluarga bahagia	1	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0.00085	0.00053	62.35
		2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	90.5208	90.5339	100.01
6.1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	orang	56.93	56.93	100.00
		2	Jumlah Nagari tanggu Bencana	tanpa satuan	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (34) Madya (0) Utama (0)	18.68
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 6							
						70.26	



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud Tujuan.....	I-1
1.3 Dasar Hukum.....	I-2
1.4 Gambar Umum Kabupaten Pesisir Selatan	I-2
1.5 Strukur Organisasi	I-5
1.6 Kepegawaian	I-7
1.7 Sistematika Penyusunan.....	I-9
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-1
2.1.1 Visi.....	II-1
2.1.2 Misi.....	II-2
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran	II-2
2.2 Perjanjian Kinerja.....	II-3
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	II-5
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	III-1
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	III-2
3.3. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-5
3.4. Akuntabilitas Keuangan	III-101
BAB IV	
PENUTUP	IV-1
4.1. Kesimpulan.....	IV-1
4.2. Saran.....	IV-1
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

Tabel	1.1	Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.....	I-3
Tabel	1.2	Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2019-2020.....	I-4
Tabel	1.3	Data Jumlah PNS Kab. Pesisir Selatan Tahun 2019-2021 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	I-8
Tabel	1.4	Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2019-2021.....	I-9
Tabel	2.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	II-2
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	II-3
Tabel	2.3	Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-5
Tabel	3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021.....	III-1
Tabel	3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2021.....	III-2
Tabel	3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.....	III-5
Tabel	3.4	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Penilaian LKD (Opini BPK) Tahun 2021.....	III-7
Tabel	3.5	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2020.....	III-8
Tabel	3.6	Realisasi Kualifikasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019-2020.....	III-10
Tabel	3.7	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.....	III-10
Tabel	3.8	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Nilai LPPD Tahun 2021.....	III-14
Tabel	3.9	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2021.....	III-16
Tabel	3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	III-18
Tabel	3.11	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek SPBE Tahun 2021.....	III-19
Tabel	3.12	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Profesional ASN Tahun 2021.....	III-20
Tabel	3.13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	III-21
Tabel	3.14	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.....	III-22
Tabel	3.15	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Kepuasan Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2021.....	III-23



Tabel	3.16	IKM atas masing-masing unsur pelayanan Tahun 2021.....	III-24
Tabel	3.17	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 4.....	III-27
Tabel	3.18	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021.....	III-27
Tabel	3.19	Jumlah Kematian Bayi Per Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021.....	III-28
Tabel	3.20	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi Tahun 2021.....	III-29
Tabel	3.21	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021.....	III-29
Tabel	3.22	Jumlah Kematian Ibu Per Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021.....	III-30
Tabel	3.23	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu Tahun 2021.....	III-31
Tabel	3.24	Realisasi Prevalensi Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021.....	III-32
Tabel	3.25	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	III-32
Tabel	3.26	Realisasi Angka Kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021.....	III-33
Tabel	3.27	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kesakitan Tahun 2021.....	III-34
Tabel	3.28	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 5.....	III-34
Tabel	3.29	Realisasi Indikator Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan Tahun 2019-2021.....	III-35
Tabel	3.30	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan Tahun 2021.....	III-35
Tabel	3.31	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 6.....	III-36
Tabel	3.32	Data Perkembangan Realisasi PPKS yang memperoleh Bantuan 2019-2021	III-38
Tabel	3.33	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 7.....	III-38
Tabel	3.34	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021.....	III-39
Tabel	3.35	Perkembangan Ketersediaan Pangan, Konsumsi Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021	III-40
Tabel	3.36	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2021.....	III-41
Tabel	3.37	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 8.....	III-42
Tabel	3.38	Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021	III-43
Tabel	3.39	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 9.....	III-43



Tabel	3.40	Capain Indikator Kinerja Sub.Sektor Pertanian	III-44
Tabel	3.41	Perbandingan Produksi Padi Kab./Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	III-45
Tabel	3.42	Rekapitulasi Serangan Hama dan Penyakit Utama pada tanaman padi Tahun 2019-2021	III-46
Tabel	3.43	Produksi Jagung Tahun 2019-2021 di Kabupaten Pesisir Selatan	III-47
Tabel	3.44	Perbandingan Produksi Jagung Tahun 2019-2021 di Sumatera Barat	III-49
Tabel	3.45	Produksi Kelapa Sawit Rakyat Tahun 2019-2021 di Kabupaten Pesisir Selatan	III-49
Tabel	3.46	Perbandingan Produksi Kelapa Sawit Rakyat Tahun 2019-2021 di Provinsi Sumatera Barat	III-50
Tabel	3.47	Jumlah Populasi Ternak Tahun 2020-2021 di Kabupaten Pesisir Selatan	III-50
Tabel	3.48	Jumlah Populasi Ternak Unggas Tahun 2020 s.d 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan	III-51
Tabel	3.49	Jumlah Populasi Daging Tahun 2019 s.d 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan	III-51
Tabel	3.50	Jumlah Populasi Telur Tahun 2019 s.d 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan	III-53
Tabel	3.51	Perkembangan Produksi Ikan Tahun 2019-2021 di Kabupaten Pesisir Selatan	III-54
Tabel	3.52	Data Perkembangan Sektor Industri Tahun 2019-2021.....	III-56
Tabel	3.53	Data Fasilitasi legalitas dan sertifikast Industri Tahun 2019-2021.....	III-56
Tabel	3.54	Data Fasilitasi Izin dan sertifikat Industri yang terbit Tahun 2019-2021.....	III-56
Tabel	3.55	Data IKM Cabang Industri Tahun 2021.....	III-57
Tabel	3.56	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 10.....	III-58
Tabel	3.57	Realisasi dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	III-59
Tabel	3.58	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2020.....	III-60
Tabel	3.59	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 11.....	III-61
Tabel	3.60	Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan jenis dan kondisi jalan Tahun 2019-2021.....	III-61
Tabel	3.61	Target dan Realisasi Jalan Kondisi baik Tahun 2019-2021.....	III-62
Tabel	3.62	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Jalan Kondisi Baik Tahun 2021.....	III-63
Tabel	3.63	Jenis, kondisi status Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021.....	III-64



Tabel	3.64	Realisasi dan Capaian Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	III-65
Tabel	3.65	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Proporsi Lahan saawah Beririgasi Baik Tahun 2021.....	III-67
Tabel	3.66	Indikator Bidang Irigasi Tahun 2019-2021.....	III-68
Tabel	3.67	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 12.....	III-71
Tabel	3.68	Titik Pantau Pengambilan Sampel Pemantauan Kualitas Air Tahun 2021.....	III-73
Tabel	3.69	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 13.....	III-76
Tabel	3.70	Realisasi dan Capaian Indikator Peningkatan Jumlah Wisatawan Tahun 2021.....	III-76
Tabel	3.71	Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Wisatawan Tahun 2019-2021.....	III-77
Tabel	3.72	Realisasi dan Capaian Indikator Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-79
Tabel	3.73	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 14.....	III-80
Tabel	3.74	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 15.....	III-81
Tabel	3.75	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2021.....	III-82
Tabel	3.76	Perkembangan Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2021.....	III-82
Tabel	3.77	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021.....	III-82
Tabel	3.78	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021.....	III-83
Tabel	3.79	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Rata rata Lama Sekolah Tahun 2021.....	III-84
Tabel	3.80	Perkembangan Indikator Kinerja Rata rata Lama Sekolah Tahun 2020-2021.....	III-84
Tabel	3.81	Perbandingan Rata rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021.....	III-85
Tabel	3.82	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 16.....	III-86
Tabel	3.83	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang berprestasi minimal tingkat propinsi Tahun 2021.....	III-86
Tabel	3.84	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menurut jenis pengunjung Tahun 2021.....	III-87
Tabel	3.85	Jumlah Perpustakaan menurut jenis perpustakaan dan kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	III-88
Tabel	3.86	Jumlah Buku Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menurut jenis buku Tahun 2021.....	III-88
Tabel	3.87	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 17.....	III-89



Tabel	3.88	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Potensi Zakat yang dikelola BAZ Tahun 2021.....	III-90
Tabel	3.89	Realisasi Penerimaan Zakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021.....	III-91
Tabel	3.90	Program Kerja BAZ Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Program BAZNAS Tahun 2019-2021.....	III-91
Tabel	3.91	Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Mesjid/Mushola Tahun 2021.....	III-92
Tabel	3.92	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 18.....	III-93
Tabel	3.93	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional Tahun 2021.....	III-93
Tabel	3.94	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 19.....	III-95
Tabel	3.95	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga Tahun 2021.....	III-95
Tabel	3.96	Realisasi dan Capaian Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2021.....	III-97
Tabel	3.97	Realisasi dan Capaian Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021.....	III-97
Tabel	3.98	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 20.....	III-98
Tabel	3.99	Perkembangan Indikator Indek Pemberdayaan Gender di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2021.....	III-99
Tabel	3.100	Realisasi dan Capaian Indikator Indek Pemberdayaan Gender di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	III-99
Tabel	3.101	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Nagari Tangguh Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	III-101
Tabel	3.102	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis.....	III-102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase luas wilayah berdasarkan kecamatan tahun 2020.....	I-3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	I-5
Gambar 1.3	Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021.....	I-8
Gambar 1.4	Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2021.....	I-9
Gambar 3.1	Produksi jagung Tahun 2019 s.d. 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-48
Gambar 3.2	Grafik Produksi Daging Tahun 2019 s.d. 2021.....	III-52
Gambar 3.3	Grafik Produksi Telur Tahun 2019 s.d. 2021.....	III-53
Gambar 3.4	Sentra IKM Carocok Mandeh Tarusan.....	III-55
Gambar 3.5	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018 s.d 2020.....	III-60
Gambar 3.6	Target dan Realisasi Per Tahun Jalan Kondisi Baik Tahun 2019-2021.....	III-62
Gambar 3.7	Peningkatan Jalan Cumateh-Kampung Sawah, Kec. Koto XI Tarusan Tahun 2021.....	III-63
Gambar 3.8	Peningkatan Jalan Simpang SMK-Bukit Batu Patah, Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2021.....	III-64
Gambar 3.9	Bendungan DI. Koto Panjang 2021.....	III-69
Gambar 3.10	Saluran Sekunder DI . Taratak Timbulan 2021.....	III-69
Gambar 3.11	Bendungan DI Taratak Timbulun 2021.....	III-69
Gambar 3.12	Bendungan DI. Sawah Rumah Gadang 2021.....	III-70
Gambar 3.13	Perbaikan sayap bendung daerah irigasi (DI) Damar Rumput.....	III-70
Gambar 3.14	Rehabilitasi Saluran (DI) Damar Rumput.....	III-71
Gambar 3.15	Pengujian kualitas air di Labor UPD Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan.....	III-75
Gambar 3.16	Panorama Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan.....	III-77
Gambar 3.17	Taman objek wisata carocok Painan.....	III-78
Gambar 3.18	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-83

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun pertama dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Penyusunan LKJIP ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Proses penyusunan LKJIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. LKJIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Penyusunan LKJIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKJIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKJIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026.

1.4. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

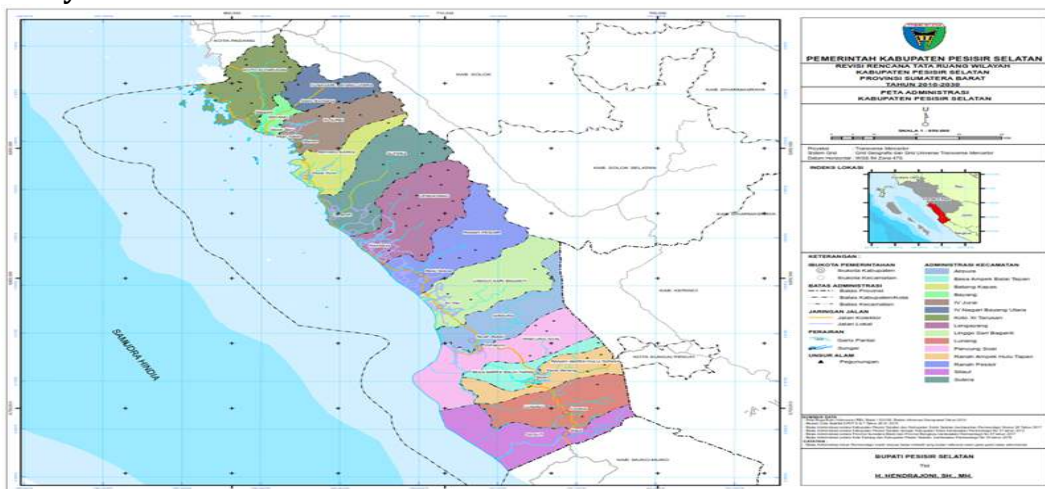
A. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera, sebelah Timur berbatasan dengan deretan pegunungan Bukit Barisan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Kota Painan sebagai Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan, berjarak 78 Km dari Kota Padang–Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan juga merupakan gerbang Selatan Provinsi Sumatera Barat, karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Muko-Muko di Provinsi Bengkulu dan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Secara astronomis Kabupaten Pesisir Selatan terletak di 00 59' - 20 28, 6' LS dan 100'019' - 101' 18' BT.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah terluas di provinsi Sumatera Barat, yaitu ± 5.749.89 km², atau 14,22 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Pesisir Selatan secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) Provinsi Jambi.

B. Wilayah Administratif

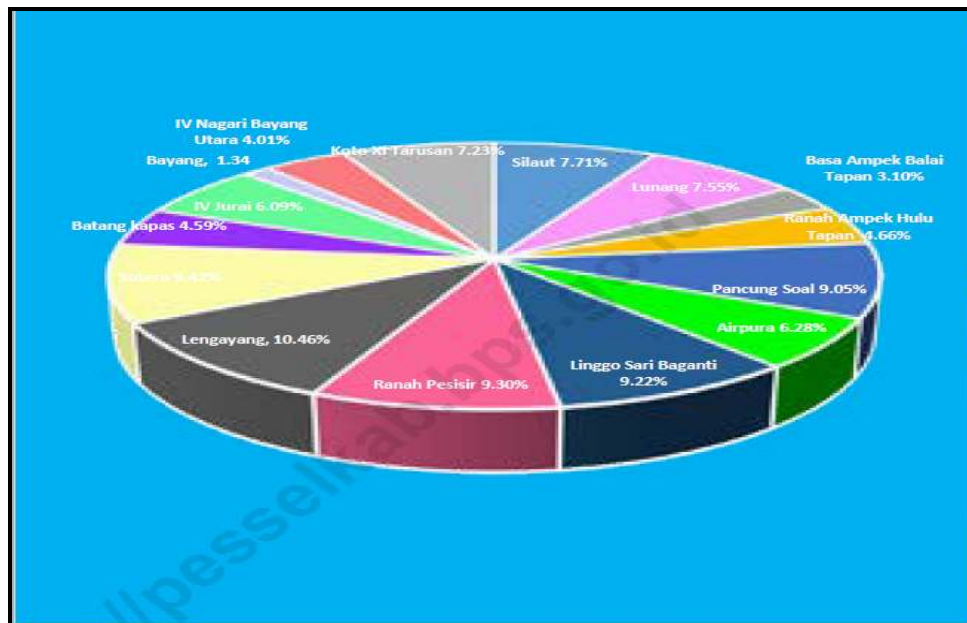


Pada tahun 2021, bentuk wilayah administratif Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah Kecamatan, 182 Nagari dan 480 kampung. Secara rinci jumlah nagari dan kampung per kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung	Luas Wilayah	
				(Km2)	(%)
1	Koto XI Tarusan	23	51	437,37	7,71
2	Bayang	17	45	80,92	3.34
3	IV Nagari Bayang Utara	6	17	242,33	0.01
4	IV Jurai	20	52	368,19	0.09
5	Batang Kapas	9	29	277,54	5.59
6	Sutera	12	32	569,81	4.42
7	Lengayang	9	45	632,96	4.46
8	Ranah Pesisir	10	27	562,44	3.30
9	Linggo Sari Baganti	16	43	557,66	2.22
10	Air Pura	10	20	380,10	2.28
11	Pancung Soal	10	24	547,41	0.05
12	Basa Ampek Balai Tapan	10	22	187,46	1.10
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	18	281,96	6.60
14	Lunang	10	28	456,73	5.55
15	Silaut	10	27	466,45	7.71
	JUMLAH	182	480	6.049,33	100,00

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2021



Gambar 1.1 Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

C. Kondisi Demografis

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan. Sedangkan kondisi demografis ialah informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian dan migrasi.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan adalah 504.418 jiwa. Kecamatan terbanyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Lengayang dengan jumlah sebanyak 60.994 jiwa dan paling sedikit adalah pendudukan yang berada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu sebanyak 8.826 jiwa. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan
Tahun 2019-2020

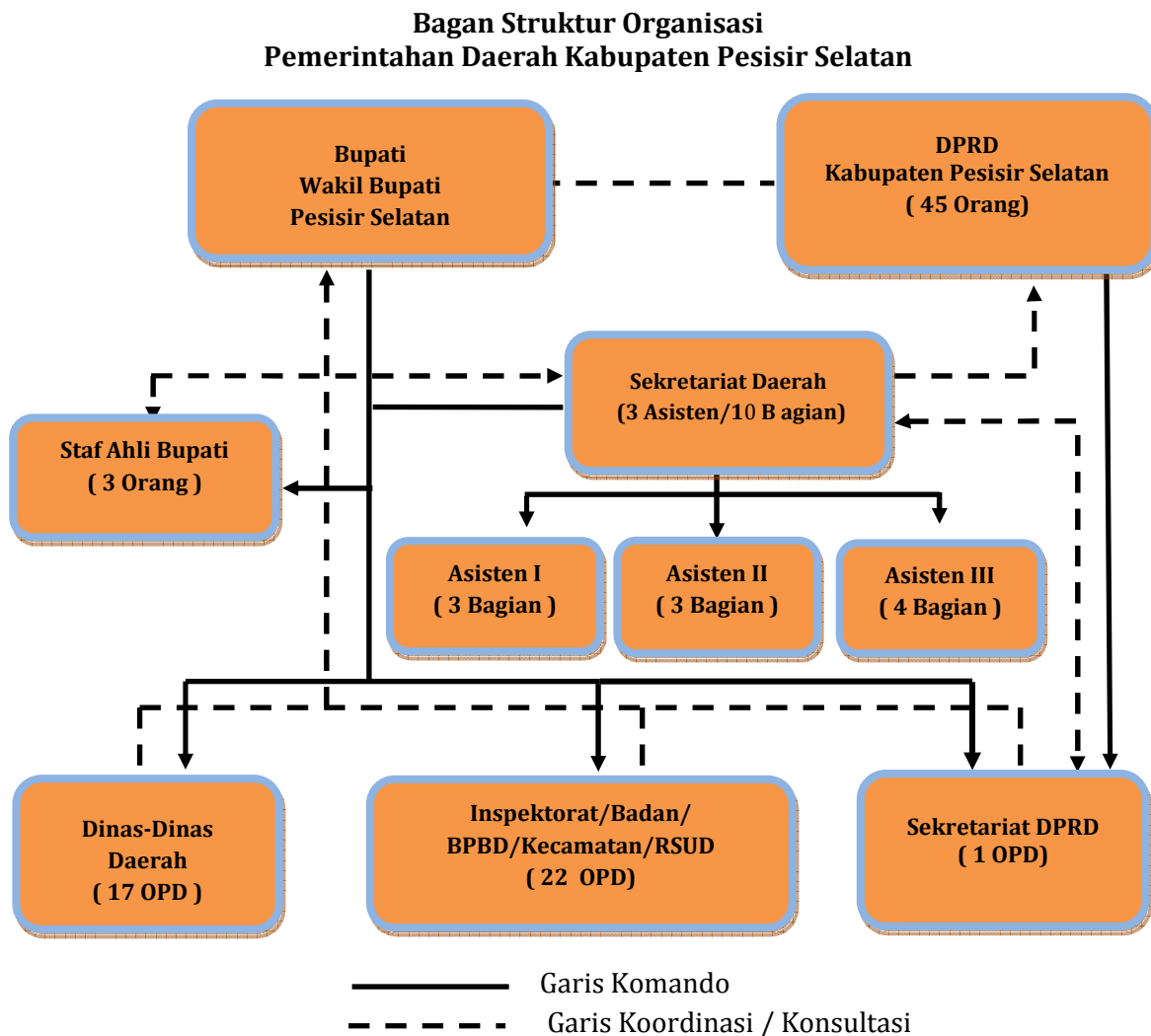
No.	Kecamatan	Tahun	
		2019	2020
1	Silaut	15.34	15.592
2	Lunang	21.95	22.423
3	Basa Ampek Balai Tapan	15.65	15.487
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	15.48	15.499
5	Pancung Soal	26.04	26.570
6	Airpura	18.19	18.180
7	Linggo Sari Baganti	49.86	49.169
8	Ranah Pesisir	34.27	33.760
9	Lengayang	62.55	60.994
10	Sutera	57.19	56.091
11	Batang Kapas	37.60	36.422
12	IV Jurai	51.75	50.894
13	Bayang	43.35	42.181
14	IV Nagari Bayang Utara	8.68	8.286
15	Koto XI Tarusan	53.85	52.870
Kabupaten Pesisir Selatan		463.920	504.418

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka tahun penerbitan, 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 berdasarkan data Pesisir Selatan Dalam Angka yang dipublikasikan oleh BPS adalah 504.418 jiwa, yang terdiri dari 253,854 orang laki-laki dan 250,564 orang perempuan. Jumlah ini naik sebesar 40.498 jiwa dari tahun 2019.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



**Gambar 1.2: Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan**

A. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Hukum
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - b. Bagian Pembangunan dan infrastruktur
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bagian Organisasi
 - d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab secara operasional kepada pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Bagian Umum
2. Bagian Persidangan dan Risalah
3. Bagian Keuangan dan Bina Program
4. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

3) Dinas Daerah

Dinas Daerah terdiri dari 17 (tujuh belas) Dinas yaitu :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
5. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
6. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Perikanan dan Pangan
12. Dinas Pertanian

13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

D. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah dibentuk terdiri dari :

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

E. Lembaga Lainnya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.Zein Painan

F. Pemerintahan Kecamatan

Pemerintahan Kecamatan terdiri dari 15 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Koto XI Tarusan
2. Kecamatan Bayang
3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
4. Kecamatan IV Jurai
5. Kecamatan Batang Kapas
6. Kecamatan Sutera
7. Kecamatan Lengayang
8. Kecamatan Ranah Pesisir
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti
10. Kecamatan Pancung Soal
11. Kecamatan Air Pura
12. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
13. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
14. Kecamatan Lunang
15. Kecamatan Silaut

1.6. KEPEGAWAIAN

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, dimana jumlah tersebut per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 6.334 orang, terdiri dari 2.055 orang laki laki atau 32,44% dan 4.279 orang Perempuan atau 67,55%, sebagaimana tergambar pada tabel 1.6 dan gambar 1.4 berikut ini :

Tabel 1.3
Data Jumlah PNS Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019–2021 Berdasarkan Jenis Kelamin

TAHUN	JUMLAH PEGAWAI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
TAHUN 2019	6,802	4,455	2,347
TAHUN 2020	6,506	4,347	2,159
TAHUN 2021	6.334	4.279	2.055

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan, 2020 per 31 Desember 2021



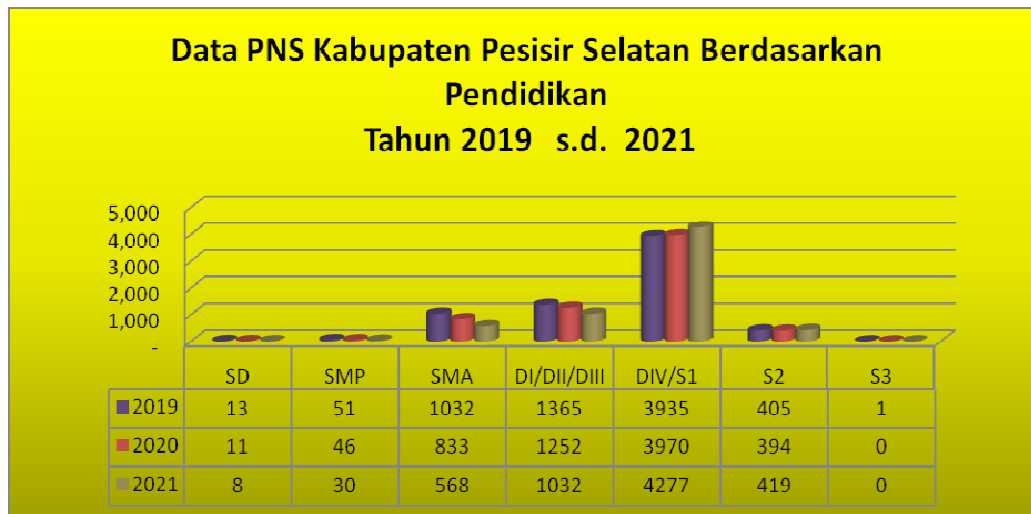
Gambar 1.3 Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan jenjang pendidikan pendidikan S2 sebanyak 419 orang sedangkan jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 4.277 orang mendominasi jenjang pendidikan SDM, disusul oleh jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 1.032 orang, SMA sebanyak 568 orang, SMP sebanyak 30 orang dan SD sebanyak 8 orang. Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.7 berikut :

Tabel. 1.4
Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemda Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2021

TAHUN	Jenjang Pendidikan							JUMLAH
	SD	SMP	SMA	DIII DI/DII/	DIIV/S1	S2	S3	
TAHUN 2019	13	51	1032	1365	3935	405	1	6802
TAHUN 2020	11	46	833	1252	3970	394	0	6506
TAHUN 2021	8	30	568	1.032	4.277	419	0	6.334

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan, 2021, per 31 Desember 2021



Gambar 1.4 Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemda Kab. Pesisir Selatan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2021

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I** : **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.
2. **Bab II** : **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.
3. **Bab III** : **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. **Capaian Kinerja Pemerintah Daerah**
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, evaluasi dan analisa capaian kinerja
 - b. **Realisasi Anggaran**
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.
4. **Bab IV** : **Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran kondisi perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Visi Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan

Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)

Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

Profesional : Penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

2.1.2. Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis

2.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

VISI

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL “

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	1.1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi	1.1.1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja
				1.2.1	Meningkatnya kapasitas birokrasi
				1.3.1	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat	2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
				2.1.2	Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat
		2.2	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	2.2.1	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat
				2.2.2	Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin
3	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor	3.1	Meningkatnya pertumbuhan dan ekonomi secara berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN
				3.1.2	Meningkatnya PDRB sektor unggulan

	potensi dan unggulan daerah			3.1.3	Menurunnya pengangguran
				3.1.4	Meningkatnya kualitas infrastruktur
				3.1.5	Terjaminnya kelestarian lingkungan
4	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan	4.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat	4.1.1	Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia
				4.1.2	Berkembangnya ekonomi kreatif
5	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing	5.1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	5.1.1	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan
				5.1.2	Meningkatnya daya saing pendidikan
		5.2	Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing	5.2.1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat
				5.2.2	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing
6	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	6.1	Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman	6.1.1	Terwujudnya keluarga bahagia
				6.1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP
		1.2	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	B (66,88)
		1.3	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209
		1.4	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3 (3,0057)



	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	2.1	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.2
		2.2	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	57
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	3.1	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	93
		3.2	Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	80
4	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	4.1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8
		4.2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	100
		4.3	Prevalensi stunting	persen	11.60
		4.4	Angka Kesakitan	persen	16.28
5	Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat	5.1	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	75
6	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	6.1	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	52,54
7	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	7.1	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	86,5
		7.2	Pengeluaran perkapita	Rp./org/thn	9,325,000
8	Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN	6.1	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	200,000
9	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	7.1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	TriliunRp	3.55
		7.2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	703.61
10	Menurunnya Pengangguran	8.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6.93
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur	9.1	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	29.55
		9.2	Rasio Konektivitas	persen	55.00
		9.3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59.05
12	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	10.1	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86.74
13	Pesisir Selatan Menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	11.1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1,000,000
		11.2	Lama tinggal wisatawan	hari	1.25
14	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	12.1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	12



15	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan	13.1	Harapan Lama Sekolah	tahun	13.36
		13.2	Rata-Rata Lama Sekolah'	tahun	8.29
16	Meningkatnya daya saing pendidikan	14.1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang	4
		14.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	5.93
17	Meningkatnya pengalaman nilainilai agama dalam kehidupan masyarakat	15.1	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96.40
		15.2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan	Rendah (≤ 10 orang)
18	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	16.1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10
		16.2	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	orang	N/a
19	Terwujudnya Keluarga Bahagia	17.1	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0
		17.2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	90.52
20	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	18.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56.93
		18.2	Jumlah nagari tangguh bencana	nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama dan target capaian Tahun 2021
Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	Hasil Evaluasi/ Opini BPK	



2.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	B (66,88)	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang SAKIP	
3.	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	Hasil Evaluasi EKPPD oleh Tim Penilai Kementerian Dalam Negeri	
4.	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3 (3,0057)	Hasil penilaian SPIP oleh BPK	
5.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.2	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang SPBE	
6.	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	57		$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$
7.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	93	Penilaian Keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat.	
8.	Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	80		<p>IKM = (Total dari nilai persepsi per unsur)/(Total unsur yang terisi) x nilai penimbang</p> <p>Dimana :</p> <p>Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah bobot)/(Jumlah unsur) = 1/14=0,071</p>
9	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8		<p>AKB = (D0 - ≤1th)/(ΣLahir Hidup) x 1000</p> <p>D0 - ≤1th = jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu</p> <p>Σlahir hidup = Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu</p>
10..	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	100		<p>AKI = JKI/JLH x 100.000</p> <p>AKI = Angka Kematian Ibu</p> <p>JKI = Jumlah Kematian Ibu</p> <p>JLH = Jumlah Kelahiran Hidup</p>
11	Prevalensi stunting	persen	11.60		$PAB(2)SPstunting = \frac{JPJK(JAB(2)SPstunting)}{JAB(2)} \times 100\%$
12	Angka Kesakitan	persen	16.28		<p>AM = JPJK/JP x 100%</p> <p>AM = (Angka Kesakitan)</p> <p>JPJK = Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas</p> <p>JP = Jumlah penduduk</p>
13	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	75		$\frac{(\text{Jumlah peserta BPJS kesehatan} + \text{BPJS Ketenagakerjaan} + \text{JKN} + \text{Jamkesda})}{(\text{jumlah penduduk})} \times 100\%$
14	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk kebutuhan dasar	persen	52,54		$\frac{\text{Jumlah PPKS yang telah memperoleh Bansos}}{\text{Jumlah keseluruhan PPKS}} \times 100\%$
15	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	86,5		<p>PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan</p>
16.	Pengeluaran perkapita	Rp./org/th n	9.325,000		<p>Y* = Pengeluaran per kapita harga konstan</p> <p>Y = Pengeluaran per kapita setahun</p> <p>IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar</p>



					$Y^* = \frac{Y}{MK} \times 100\%$
17	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	200000	Jumlah keseluruhan nilai investasi swasta dan masyarakat (di luar investasi pemerintah) dalam satu tahun	
18	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	TriliunRp	3.55	Jumlah PDRB dari sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun	
19	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	703.61	Jumlah PDRB dari sektor industri pengolahan berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun	
20.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6.93		TPT = (Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja) / (Jumlah penduduk angkatan kerja) x 100% TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
21	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	29.55		(Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik) / (Panjang Jalan Kabupaten) x 100%
22	Rasio Konektivitas	persen	55.00		Rasio konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
23	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59.05		(Luas lahan fungsional sawah beririgasi baik) / (Luas lahan fungsional sawah keseluruhan) x 100%
24	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86.74		Indeks Pencemaran Air + Indeks Pencemaran Udara + Indeks Tutupan Lahan
25	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1,000,000	Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata berbayar di Pesisir Selatan dalam 1 (satu) tahun	
26	Lama tinggal wisatawan	hari	1.25	Jumlah hari yang dihabiskan wisatawan yang berkunjung ke Pesisir selatan untuk tinggal di hotel/penginapan	
27	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	12		Omset UEK = $\sum_{i=1}^{12} \dots$
28	Harapan Lama Sekolah	tahun	13.36		$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
29	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8.29		$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$
30.	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang	4	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang memperoleh penghargaan minimal tingkat provinsi	
31	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	5.93	Survey kajian IPLM	



32	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96.40	Jumlah zakat harta	
33	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan	Rendah (≤ 10 orang)	Jumlah orang yang mengikuti shalat subuh berjamaah di mesjid/mushola	
34	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	Jumlah pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional	
35	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0.00085		$(\text{Jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan}) / (\text{Jumlah keseluruhan keluarga}) \times 100\%$
36	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	90.52		$(\text{Jumlah rumah layak huni}) / (\text{Jumlah keseluruhan rumah}) \times 100\%$
37	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56.93	Rata-rata aritmatik dari dimensi Keterwakilan di parlemen, Pengambilan keputusan dan dimensi Distribusi pendapatan.	
38	Jumlah nagari tangguh bencana	nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Jumlah nagari yang sudah memenuhi kriteria tangguh bencana	

Sumber: RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja pemerintahan yang fokus pelaporannya adalah keberhasilan atau ketidakberhasilan unit organisasi dalam proses perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LKJIP berisi pula tentang indikator kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progres realisasi kinerja terhadap pencapaian tujuan.

Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian target kinerja pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dengan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun pelaksanaan anggaran dengan bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :

1. Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja SKPD, laporan keuangan Perangkat Daerah/laporan keuangan pemerintah daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya ;
2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya data-data yang bersumber atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan. Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :
 - a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja dalam upaya perwujudan visi dan misi kepala daerah. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2021

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 18 (delapan belas) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 1 : Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan							
Tujuan 1 : Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi							
1.1.1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1	Penilaian LKD (opini BPK)	tanpa satuan	WTP	WTP	100
		2	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	tanpa satuan	B (68,00)	B (66,88)	98.35
		3	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3209	100
		4	Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	3 (3,0057)	3 (3,0000)	99.81
1.1.2	Meningkatnya kapasitas birokrasi	1	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3.34	104.38
		2	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	57	48.78	85.58
1.1.3	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	1	Kategori keterbukaan terhadap informasi publik	tanpa satuan	93	97	104.30
		2	Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	80	83.65	104.56
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat							
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat							
2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	7	112.50
		2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	100	172	28.00
		3	Prevalensi stunting	persen	11.6	12.3	94.00
		4	Angka kesakitan	persen	16.28	16.57	98.00
2.1.2	Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat	1	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	75	64.7	86.27
Tujuan 2 : Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat							
2.2.1	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	1	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	52.54	65.28	124.25
2.2.2	Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	1	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	86.5	81.7	94.45
		2	Pengeluaran per kapita	Rp./org/thn	9,325,000	9,270,000	100.59
MISI 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah							



Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan dan ekonomi secara berkelanjutan							
3.1.1	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	1	Nilai investasi swasta dan masyarakat	juta Rp.	200,000,000,000	1,767,753,324,797	883.88
3.1.2	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	1	Nilai PDRB sektor Pertanian (ADHK)	Triliun Rp.	3.55	3.60	101.41
		2	Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	703.61	725.44	103.10
3.1.3	Menurunnya pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka	persen	6.93	5.97	86.15
3.1.4	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1	Persentase jalan kabupaten kondisi	persen	29.55	30.78	104.16
		2	Rasio konektivitas	persen	55	55	100.00
		3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59.05	59.13	100.14
3.1.5	Terjaminnya kelestarian lingkungan	1	Indek kualitas lingkungan	tanpa satuan	86.74	75.8	87.39
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan							
Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat							
4.1.1	Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit din pantai barat Indonesia	1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1,000,000	344,297	34.43
		2	Lama tinggal wisatawan	hari	1.25	1.25	100.00
4.1.2	Berkembangnya ekonomi kreatif	1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	12	7.2	60.00
MISI 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
Tujuan 1 : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas							
5.1.1	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	1	Harapan lama sekolah	tahun	13	13.33	99.78
		2	Rata-rata lama sekolah	tahun	8.29	8.27	99.76
5.1.2	Meningkatnya daya saing pendidikan	1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat propinsi	orang	4	3	75
		2	Indek Pembangunan literasi	tanpa satuan	5.9258	5.9258	100.00
Tujuan 2 : Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
5.2.1	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	1	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96	63.00	65.35
		2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah dimesjid / mushola	tanpa satuan	Rendah (≤ 10 orang)	Tinggi (> 30 orang)	300



5.2.2	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	10	100.00
MISI 6 : Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan dinamis							
Tujuan 1 : Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman							
6.1.1	Terwujudnya keluarga bahagia	1	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0.00085	0.00053	62.35
		2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	90.5208	90.534	100.01
6.1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	orang	56.93	56.93	100.00
		2	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	tanpa satuan	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (34) Madya (0) Utama (0)	18.68
Rata-rata Capaian Indikator 20 Sasaran Strategis : 37 Indikator Kinerja							115.95

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 115,95%, sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator nilainya predikat **Sangat Baik**, sebanyak 1 (satu) indikator nilainya predikat **Baik**, sebanyak 3 (tiga) indikator nilainya predikat **cukup** dan sebanyak 3 (tiga) indikator gagal.

3.3. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penilaian LKD (opini BPK)	tanpa satuan	WTP	WTP	100
2	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	tanpa satuan	B (68,00)	B (66,88)	98.35
3	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3209	100
4	Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	3 (3,0057)	3 (3,0000)	99.81
Rata-rata Capaian					99.54

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 99.54%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Penilaian LKD (opini BPK)

Ada beberapa indikator yang dapat menjadi ukuran keberhasilan good governance dan clean government diantaranya yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik apabila dari hasil audit BPK mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah opini BPK. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2021 menyatakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini BPK diberikan kepada Daerah yang memenuhi Kriteria sebagai berikut (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

BPK dapat memberikan 4 (empat) jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara

keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Berikut tabel 3.4, realisasi dan capaian indikator kinerja Penilaian LKD (opini BPK):

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Penilaian LKD
(Opini BPK) Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penilaian LKD (Opini BPK)	opini	WTP	WTP	100

Formulasi capaian indikator kinerja Penilaian LKD (Opini BPK)

Hasil Evaluasi/ Opini BPK

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 target indikator kinerja Penilaian Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK) adalah WTP dengan realisasi WTP dan capaian indikator kinerja adalah 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini adalah **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Pada tahun 2021, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan nomor : 46.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 dan nomor 46.B/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tanggal 6 Mei 2021 dan surat hasil pemeriksaan atas LKD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 92/S-HP/VXIII.PDG/05/2021 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk ketujuh kalinya sejak laporan keuangan tahun 2014. Keberhasilan Pemda Kabupaten Pesisir Selatan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan upaya :
 - 1) Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang- undangan;
 - 3) Meningkatkan peran PPK-SKPD untuk meyakini compliance.
2. Adanya upaya seluruh SKPD di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kualitas LK-SKPD nya masing-masing. Salah satunya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk mempertahankan Opini BPK adalah:

- a. Melakukan Rekonsiliasi Bidang BMD dan Akuntansi dengan 45 SKPD (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran) serta Melakukan asistensi dan fasilitasi kepada SKPD terkait penyusunan laporan keuangan setiap bulannya sehingga menghasilkan data/angka yang valid dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Bendahara, PPK, dan Sekretaris seluruh SKPD.
- c. Selain itu juga dilakukan pendampingan secara terus menerus melalui group Whatsapp yaitu Help Desk SIPKD. Di grup ini apabila SKPD menemui masalah akan dapat ditindaklanjuti langsung oleh admin SIPKD keuangan maupun SIPKD Aset.

2. Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sasaran Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan, Komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 adalah **66,88** dengan kategori **B**. Rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5
Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019 s.d 2020

No.	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		
		Bobot	2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,64	21,96
b.	Pengukuran kinerja	25	16,51	17,03
c.	Pelaporan kinerja	15	10,97	10,97
d.	Evaluasi kinerja	10	6,63	6,94
e.	Capaian kinerja	20	10,03	9,98
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,78	66,88
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber : Hasil Evaluasi Menpan RB, 2020

Hasil akuntabilitas kinerja yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : B/191/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, diuraikan 6 (enam) hasil evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil er viu tahun 2019, sehingga belum terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang signifikan.
2. Kelemahan yang masih dijumpai antara lain sebagai berikut :
 - a. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan tidak memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;
 - b. Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga belum terlihat hubungan lintas fungsi antara OPD yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja secara menyeluruh;
 - c. Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi saja. Belum sepenuhnya terlihat adanya keterlibatan pimpinan OPD dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan;
 - d. Pimpinan OPD belum terlibat aktif dalam pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektivitas program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi jika diperlukan yang dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
 - e. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja masih terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategis dalam pelaksanaannya;
 - f. Hasil evaluasi internal SAKIP yang telah dilakukan oleh inspektorat terhadap perangkat daerah belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan; dan
 - g. Rendahnya kualitas implementasi SAKIP mengakibatkan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum mendukung pencapaian kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maka diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan untuk melakukan re vi u dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pohon kinerja yang telah disusun sampai ke level individu;
2. Melakukan re vi u atas keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja

- dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan fungsi perencanaan, keuangan dan kinerja untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh;
 4. Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi dan tawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan reward dan punishment bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja;
 5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisa secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja;
 6. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan profesional judgement secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
 7. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Realisasi AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi Kualifikasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2020-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2020	2021
1.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	skala	B	B*

Berikut tabel 3.7 realisasi dan capaian indikator kinerja Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:

Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kualifikasi Penilaian
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021*		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Tanpa satuan	B (68,00)	B (66,88)	98.35

*Data sementara

Formulasi capaian indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
tentang SAKIP**

Sumber data : Perbup Definsi Operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 adalah B (68,00) dan terealisasi B* (66,88) dengan capaian indikator kinerja adalah 98,35%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Dalam peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, masih ditemukan hambatan antara lain :

1. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan Renstra pada masing-masing Perangkat Daerah masih perlu perbaikan sesuai dengan hasil rekomendasi Kemendagri.
2. Prosedur penganggaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan
3. Perjanjian Kinerja yang disusun belum seluruhnya mencerminkan outcome, baik di level eselon II maupun eselon IV
4. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai
5. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome
6. Implementasi teknologi informasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan yaitu melalui aplikasi E-Sakip masih ditemukan permasalahan dan kendala antara lain:
 - a. Masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan Renstra pada masing-masing SKPD sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Perlu ada perbaikan terhadap keselarasan dokumen penganggaran Perangkat Daerah dengan renstra
 - c. Masih ada Perjanjian Kinerja yang disusun belum mencerminkan outcome.
 - d. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai
 - e. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome

Dalam rangka memperbaiki Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Inspektorat melakukan review terhadap dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah, yang mencakup review tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama yang relevan spesifik dan terukur

2. Tetap melaksanakan kegiatan pendampingan dalam penyusunan cascading untuk seluruh perangkat daerah oleh Tim Asistensi yang terdiri dari Bapedalitbang, Inspektorat dan Sekretariat Daerah
3. Melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan program yang sudah disusun dalam RPJMD
4. Menyusun perjanjian kinerja secara berjenjang dari eselon II, III, IV dan Staf
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan e-SAKIP sebagai media informasi evaluasi terhadap capaian kinerja

3. Skor nilai LPPD

Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Nilai LPPD Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPP) dalam wilayah provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor : 700/1054/Insp-SE/2019, tanggal 18 November 2019.

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 ditetapkan target LPPD yang harus dicapai dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) tahun 2021 yaitu 3209 dengan skor penilaian sangat tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi sementara terhadap LPPD Kabupaten Pesisir Selatan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu 3209 dengan skor penilaian sangat tinggi. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 100%.

Berdasarkan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Se-Sumatera Barat, Nilai LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 berada pada urutan ke-6 dari 19 Kabupaten/Kota. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong SKPD untuk memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Capaian target LPPD tersebut masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa indikator kinerja kunci (IKK) yang masih rendah dan sedang nilainya. Beberapa IKK tersebut antara lain :

1. Tataran pengambil kebijakan
2. Tataran pelaksana kebijakan
3. Pelaksanaan urusan wajib (Perumahan Rakyat dan permukiman, penanaman modal, perhubungan, pertanahan, fungsi penunjang pemberdayaan masyarakat desa serta statistik)
4. Pelaksanaan urusan pilihan kelautan dan perikanan, pariwisata dan transmigrasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 diperoleh hasil evaluasi terhadap :

A. Indeks Hasil EKPP

Penilaian terhadap Capaian Kinerja mendapat kategori prestasi Tinggi dilakukan terhadap Tataran Pengambilan Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan.

1. Tataran Pengambil Kebijakan

Tataran Pengambilan Kebijakan terdiri dari 13 Aspek dengan 43 Indikator Kinerja Kunci (IKK).

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah terdiri dari aspek administrasi umum dan urusan pemerintahan. Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah mendapat skor kategori prestasi tinggi dengan uraian sebagai berikut :

a. Aspek administrasi umum

Aspek administrasi umum terdiri dari 8 aspek dengan 21 indikator kinerja kunci (IKK) yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan dengan jumlah IKK sebanyak 630. Penilaian pada aspek administrasi umum mendapatkan skor kategori prestasi sangat tinggi

Skor dan prestasi per Urusan yang dilaksanakan oleh SKPD

- Skor tertinggi dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada urusan statistik
- Skor terendah dengan prestasi sedang terdapat pada urusan Pariwisata

b. Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan terdiri dari 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan penilaian terhadap urusan pemerintahan mendapatkan skor kategori prestasi tinggi

B. *Indek kesesuaian materi*

Penilaian Indek Kesesuaian Materi dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan Komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan penyajian indikator kinerja kunci (IKK). Hasil penilaian mendapatkan skor 4,000

Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Tata Pengambilan Kebijakan

Terhadap 2 (enam) IKK capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

2. Tata Pelaksana Kebijakan

a. Administrasi Umum

Terhadap 90 (sembilan puluh) IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang

b. Capaian Kinerja

Terhadap 4 (empat) urusan wajib (kepemudaan dan olah raga, trantribum Linmas, Kearsipan dan perpustakaan) dan 2 (dua) urusan pilihan perindustrian dan perdagangan dengan prestasi sedang (S) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang

Realisasi indikator kinerja skor nilai LPPD diperoleh dari dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2019 oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri menetapkan 4 kategori prestasi keberhasilan sebagai berikut:

NO	INDEKS LPPD	PRESTASI
1	3,00<.....≤4,00	Sangat Tinggi
2	2,00<.....≤3,00	Tinggi
3	1,00<.....≤2,00	Sedang
4	0,00≤.....≤1,00	Rendah

Realisasi dan capaian indikator kinerja skor nilai LPPD Tahun 2021 pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Nilai LPPD
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Skor Nilai LPPD	skor	3209	3209	100

Formulasi capaian indikator kinerja Skor Nilai LPPD

Hasil Evaluasi EKPPD oleh Tim Penilai
Kementerian Dalam Negeri

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Skor Nilai LPPD Tahun 2021 : } \frac{3,209}{3,209} \times 100\% = 100\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Skor Nilai LPPD Tahun 2020 adalah 3,209 dan terealisasi sebesar 3,209 dengan capaian adalah 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Melihat sumberdaya yang dimiliki Pesisir Selatan, target nilai EKPPD 3,209 dengan skor penilaian sangat tinggi adalah target optimis dan realitis untuk dapat dicapai. Upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komitmen kepala daerah beserta seluruh jajaran perangkat daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan urusan pilihan) menjadikan EKPPD sebagai ukuran dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

2. Menyediakan sumberdaya manusia ((aparatur) dan dukungan anggaran yang memadai pada setiap perangkat daerah untuk menyusun dan menyajikan seluruh dokumen laporan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk LPPD. Dengan demikian setiap perangkat daerah akan menyusun berbagai dokumen laporan seperti LKD, LKJIP, LKPJ dan LPPD dengan satu basis data
3. Memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang capaian IKK urusan pemerintahan sangat tinggi dan melakukan pembinaan kepada perangkat daerah dengan capaian IKK rendah
4. Menetapkan perangkat daerah sebagai penanggungjawab utama dalam pencapaian IKK sesuai dengan urusan pemerintahan dan menentukan perangkat daerah lainnya penunjang dalam pencapaian IKK tersebut. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kelengkapandata pokok dan data penunjang sebagai lampiran yang diperlukan dalam proses evaluasi.

4. Level Maturitas SPIP

Maturitas sistem pengendalian internal merupakan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik kualitas sistem pengendalian internnya. Selain itu penilaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021–2026. Indikator kinerja ini berupa tingkat kematangan implementasi SPIP yang berskala 1–5. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2021, level maturitas SPIP Kabupaten Pesisir Selatan meraih predikat level 3. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan serta langka dan upaya yang dilakukan oleh OPD penanggung jawab pencapaian target indikator kinerja level maturitas SPIP yaitu Inspektorat beserta OPD pendukung dalam memenuhi kriteria penilaian. Langkah–langkah yang harus dilakukan penilaian level SPIP antara lain :

1. Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis
2. Pengkomunikasian kebijakan dan prosedur
3. Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi
4. Evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi
5. Pemantauan/pengembangan berkelanjutan

Implementasi dari penilaian level maturitas SPIP yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Menerapkan perilaku dan penegakkan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara
- b. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan
- c. Implementasi kepemimpinan yang kondusif
- d. Prosedur dan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

- e. Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM
- f. Hasil kinerja pengawasan Inspektorat secara internal dan eksternal
- g. Reviu kinerja atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja
- h. Rekonsiliasi antar OPD
- i. Meningkatkan kinerja pegawai OPD
- j. Pengendalian umum dan pengendalian kinerja yang signifikan
- k. Pengamanan barang milik daerah (BMD)
- l. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting

Peningkatan maturitas level SPIP di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dicapai dengan beberapa upaya antara lain :

- Adanya komitmen Kepala Daerah untuk menyelenggarakan SPIP
- Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- Ditetapkannya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 700/513/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
- Ditetapkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- Melakukan Sosialisasi tentang SPIP
- Melakukan Penilaian Lingkungan Pengendalian dengan Pendekatan CSA/CEE
- Melakukan pengukuran melalui pendekatan maturitas SPIP dan berkoordinasi dengan BPKP
- Mengidentifikasi AOI, merumuskan, melaksanakan, memantau strategi spesifik pemenuhan AOI dengan berkoordinasi dengan BPKP
- Melakukan Re-Assesment maturitas SPIP berkoordinasi dengan SPIP

Berikut tabel 3.9, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2021.

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	3 (3,0057)	3 (3,0000)	99.81

Formulasi capaian indikator kinerja Level Maturitas SPIP

Hasil penilaian SPIP oleh BPK

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Level Maritas SPIP Tahun 2021 :	(3) 3,0000	X	100%	=	99.81%
	(3) 3,0057				

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2021 adalah 3,0000 dan realisasi 3,0057 dengan capaian adalah 99.81%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 telah berada pada level 3 artinya secara umum menunjukkan bahwa SPIP telah dipraktekkan diseluruh organisasi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan didukung dengan sistem pendokumentasian yang memadai, namun efektifitas pengendalian belum seluruhnya dievaluasi sehingga terdapat kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Beberapa infrastruktur pengendalian intern yang masih belum dilaksanakan secara memadai yaitu :

1. Belum sepenuhnya mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan serta prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah serta belum mendokumentasikan secara konsisten.
2. Belum melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah secara berkala dan terdokumentasi.
3. Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan semua kegiatan.
4. Belum memiliki petunjuk teknis/pelaksanaan terkait penilaian resiko, mulai dari penyusunan daftar resiko (risk register), peta resiko sampai dengan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan berlaku pada seluruh Perangkat Daerah secara Komprehensif.

Untuk dapat ke level yang lebih tinggi dari capaian sekarang maka perlu melakukan :

1. Mengoptimalkan implementasi SPIP.
2. Menyusunan dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2019, dan inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Koordinator.
3. Melakukan penilaian maturitas SPIP secara mandiri terhadap semua PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan aplikasi web site.
4. Membuat pedoman penilaian risiko secara khusus dan menyusun RTP berbasis risiko secara komprehensif atas program/kegiatan utama PD dan mengimplementasikan menjadi dasar perencanaan kegiatan yang harus ditindaklanjuti oleh PD terkait.
5. Setiap Kepala PD terkait agar melakukan evaluasi secara berkala atas:
 - a. Aturan prilaku dan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara.
 - b. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan.
 - c. Implementasi kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Prosedur dan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggungjawab.
 - e. Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM.
 - f. Hasil kinerja pengawasan inspektorat secara internal dan eksternal.
 - g. Reviu kinerja atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja.

- h. Rekonsiliasi antar PD.
- i. Meningkatkan Kinerja Pegawai PD.
- j. Pengendalian Umum dan pengendalian kinerja yang signifikan.
- k. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).
- l. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan Yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN antara lain :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
5. Program Pemantapan Otonomi Daerah
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
7. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
9. Perencanaan pembangunan Daerah
10. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
11. Program Pemantapan Otonomi Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas birokrasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3.34	104.38
2.	Indeks Profesional ASN	tanpa satuan	57	48.78	85.58
Rata-rata Capaian					94,98

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 94,98%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Indeks SPBE

Indek Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mengetahui pelaksanaan SPBE (tingkat kematangan SPBE) pada instansi pemerintah tersebut perlu dilakukan evaluasi. Tingkat kematangan dalam evaluasi SPBE ini ditinjau dari tahapan pada 2 (dua) yaitu kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Sedangkan dalam menentukan penilaian akhir, nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 1. Nilai Indeks Aspek adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu. 2. Nilai Indeks Domain adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu. 3. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan kategori sebagai berikut:

No.	Nilai Indeks	Kategori
1.	4,2-<5,0	memuaskan
2.	3,5-<4,2	Sangat baik
3.	2,6-<3,5	baik
4.	1,8-<2,60	cukup
5.	<1,8	kurang

Target tahun 2021 nilai indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan adalah 3,20 dengan realisasi 3,34. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa nilai indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 termasuk kategori “Baik”. Untuk memperoleh hasil tersebut Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan evaluasi penerapan SPBE pada 41 Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah. Berikut tabel 3.9, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks SPBE Tahun 2021.

Tabel 3.11
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks SPBE
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3.34	104.38

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks SPBE

Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang
SPBE

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Indek SPBE Tahun 2021 : } \frac{3.34}{3.20} \times 100\% = 104.38\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks SPBE tahun 2021 adalah 3,20 dan realisasi level 3,34 dengan capaian adalah 104,38%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

2. Indeks Profesional ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks ini secara nasional dijadikan acuan intervensi kebijakan peningkatan profesionalitas ASN dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengukuran indeks berdasarkan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaannya pengukuran dilakukan oleh BKN dengan sumber data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Berikut tabel 3.12, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesional ASN tahun 2021.

Tabel 3.12
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesional ASN
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Profesional ASN	tanpa satuan	57	48.78	85.58

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Profesional ASN

$$\begin{aligned} IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i \\ &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 \end{aligned}$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Indeks Profesional ASN Tahun 2021 : } \frac{48.78}{57} \times 100\% = 85,58\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2021 targetnya adalah 57 dan terealisasi 48,78 dengan capaian kinerja sebesar 85,58%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Sasaran 3 : Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kategori keterbukaan terhadap informasi publik	tanpa satuan	93	97	104.30
2.	Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	80	83.65	104.56
Rata-rata Capaian					104,43

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 104,43%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Kategori keterbukaan terhadap informasi publik

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Keterbukaan informasi publik didasarkan pada pertimbangan :

- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Adapun tujuan dari Keterbukaan informasi publik adalah untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berikut tabel 3.14, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

Tabel 3.14
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kategori Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	93	97	104.30

Formulasi capaian indikator kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik

Penilaian Keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat.

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Kategori keterbukaan informasi publik Tahun 2021 :	$\frac{97}{93}$	X	100%	=	104,30%
--	-----------------	---	------	---	---------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kategori keterbukaan informasi publik Tahun 2021 ditargetkan 93 (informatif) dan terealisasi sebesar 97 (informatif) dengan capaian kinerja sebesar 104,30%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

2. **Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik**

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat memerlukan data atau informasi kepuasan masyarakat, yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Survey kepuasan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dimana kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat diketahui dari persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan karena pelayanan publik merupakan indikator keberhasilan pemerintah yang dapat dirasakan masyarakat.

Berikut tabel 3.15, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2021.

Tabel 3.15
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	80	83.65	104.56

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik

$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$
Dimana :
$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2021 :	$\frac{83,65}{80} \times 100\% = 104,56\%$
---	--

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2021 target 80 dan realisasi 83,65 dengan capaian kinerja adalah 104,56%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Survey indek kepuasan masyarakat terdiri dari 10 (sepuluh) unsur yang harus ada dalam unsur SKM diantaranya kejelasan pelayanan, persyaratan pelayanan, Sistem, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, perilaku pelaksana, kompetisi pelaksana, dan hasil produk layanan. Sebagai upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

melakukan survey kepuasan masyarakat kepada perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu Unit Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, RSUD M. Zein Painan dan RSUD Tapan.

Maksud dilakukan survey indek kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, RSUD M. Zein Painan dan RSUD Tapan adalah untuk mengetahui penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan pelayanan kesehatan. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

1. Terukurnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, RSUD M. Zein Painan dan RSUD Tapan.
2. Untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, RSUD M. Zein Painan dan RSUD Tapan secara periodik.
3. Hasil pengukuran dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
4. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pencapaian indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sebagai ukuran dasar dalam menilai penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya

Secara umum nilai skor semua unsur telah mencapai nilai Baik. Sebagaimana diketahui nilai 1 (TIDAK BAIK), nilai 2 (KURANG BAIK), nilai 3 (BAIK) dan nilai 4 (SANGAT BAIK). Bila diambil nilai minimal indeks kepuasan masyarakat dengan standar nilai rata-rata 3 (BAIK), berarti 3×245 (jumlah responden), maka nilai skor yang didapat adalah 735.

Dari hasil survey ini masih ada pembenahan yang perlu dilakukan oleh Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Tapan dan RSUD DR.M.Zein Painan di Kabupaten Pesisir Selatan. Bila diurut satu persatu dari unsur pelayanan, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.16
IKM atas Masing-Masing Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai RR perunsur	Nilai rata2 tertimbang
1	Biaya/Tarif Pelayanan	3,980	0,398
2	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,560	0,356
3	Persyaratan Pelayanan	3,330	0,333
4	Kejelasan Persyaratan	3,310	0,331
5	Perilaku Pelaksana	3,290	0,329
6	Kompetisi Pelaksana	3,290	0,329
7	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,250	0,325
8	Waktu Pelayanan	3,160	0,316
9	Sarana dan Prasarana	3,150	0,315
10	Hasil Produk Layanan	3,140	0,314

Jumlah

33,460

3,346

Nilai Indeks Kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Tapan dan RSUD DR.M.Zein Painan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = $3,346 \times 25 = 83,650$.
- b. Mutu Pelayanan = B
- c. Kinerja Unit Pelayanan = **BAIK**

Karena penilaian masyarakat ini masih berada pada nilai kategori B dan **BAIK**. Untuk itu perlu terus dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kedisiplinan petugas dan menjadikan kedisiplinan/kehadiran secara terukur.
2. Ketersediaan layanan pengaduan masyarakat.
3. Tindak lanjut dari keluhan pengaduan/saran masyarakat.
4. Memfasilitasi pengaduan masyarakat melalui form dan kotak pengaduan (diisi tanpa harus memberikan identitas), dan di evaluasi setiap hari.
5. Melakukan penelusuran atas pengaduan yang diterima.
6. Merespon pengaduan secepat mungkin.
7. Prosedur pelayanan di publikasikan (dalam bentuk papan, poster dan brosur).
8. Kejelasan tahapan pelayanan.
9. Kesederhanaan/kemudahan tahapan pelayanan/proses pelayanan.
10. Kecepatan pendaftaran pelayanan.
11. Diperlukan kemampuan menjelaskan dengan mudah kepada masyarakat tentang tahapan pelayanan dan dibantu dengan adanya poster/brosur. Dalam hal peningkatan kemampuan ini, pelatihan komunikasi dan servise menjadi hal yang dibutuhkan oleh jajaran pelayanan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Tapan dan RSUD DR.M.Zein Painan di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Jika diperlukan menata ulang sistem pendaftaran atau menambah loket pelayanan agar mempermudah kecepatan pelayanan dan memperpendek antrian pada loket antrian pelayanan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Tapan dan RSUD DR.M.Zein Painan di Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Sarana dan prasarana penunjang pada Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Tapan dan RSUD DR.M.Zein Painan di Kabupaten Pesisir Selatan., seperti ruangan pelayanan yang memadai dan nyaman, ruangan tunggu yang memadai, kafetaria, ruangan shalat dan WC umum.
14. Penyediaan Genset sebagai antisipasi bila pasokan listrik dari PLN mengalami gangguan.
15. Dibuat dan ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan. Standar pelayanan ini setidaknya-tidaknya memuat tentang persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya dan produk pelayanan.
16. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga masyarakat memahami bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan kependudukan sampai jangka waktu penyelesaian pelayanan.
17. Penambahan tenaga IT dibidang pelayanan dan pengoperasian peralatan pelayanan.

18. Peningkatan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat yang dilayani, sehingga menimbulkan empati dari masyarakat yang dilayani.
19. Kejelasan petugas dan pembagian tugas dalam pelayanan.
20. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau dibawah rata-rata, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.
21. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima) khususnya bagi petugas yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
22. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.
 - b. Memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.
 - c. Memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (*punishment*) kepada petugas.
23. Diperlukan penambahan petugas yang melayani masyarakat secara langsung, agar kecepatan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Disamping itu juga dapat melakukan pendistribusian petugas secara tepat agar produktifitas untuk masing-masing petugas pelayanan bisa lebih maksimal.
24. Diharapkan setelah mendapatkan Juara Harapan I Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan lebih meningkatkan kinerja, agar Inovasi tersebut dapat menjadi acuan oleh Kabupaten/Kota lain.
25. Diperlukan upaya oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan Sistem Informasi yang menyangkut kesetiaan pada Kecamatan, telephone, SMS Center, Email, dan/atau penempatan Kotak Saran.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3.17
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	7	112,50%
2.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	100	172	28%
3.	Prevalensi stunting	persen	11,6	12,3	94
4.	Angka kesakitan	persen	16,28	16,57	98
Rata-rata Capaian					83,13

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 4 sebesar 83,13%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan input data dari Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut rincian angka kematian bayi tahun 2019-2021 yang diperoleh dari 20 puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan:

Tabel 3.18
Angka Kematian Bayi (AKB)
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021

Indikator	2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Bayi (AKB) / 1000 KH	22/ 1000 KH	8,6/ 1000 KH	160 %	21/ 1000 KH	6,9/ 1000 KH	167%	8/ 1000 KH	7/ 1000 KH	112,50%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa, ada kenaikan jumlah realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2020 sebanyak 6,9/1000 KH menjadi 7/1000 KH. Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan tersebar di Puskesmas, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.19
Jumlah Kematian Bayi di Puskesmas
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2021

NO	PUSKESMAS	Jumlah Kelahiran			Jumlah Kematian Bayi		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Barung2 Belantai	414	397	320	6	4	3
2	Tarusan	517	515	482	12	9	2
3	Pasar Baru	415	413	389	2	2	2
4	Koto Berapak	350	333	321	2	2	4
5	Asam Kumbang	102	122	120	3	2	1
6	Salido	723	637	603	6	3	8
7	Lumpo	193	212	189	0	0	3
8	Pasar Kuok	390	383	318	4	7	4
9	IV Koto Mudik	202	171	168	2	6	4
10	Surantih	1016	984	989	10	5	2
11	Kambang	762	746	698	7	1	2
12	Koto Baru	343	273	264	4	2	1
13	Balai Selasa	543	543	492	6	3	5
14	Air Haji	915	888	796	3	4	1
15	Air Pura	372	347	477	0	0	1
16	Indera Pura	546	501	309	2	1	5
17	Tapan	257	271	270	3	5	0
18	Rahul	283	278	277	0	2	0
19	Tanjung Beringin	429	393	408	4	4	7
20	Tanjung Makmur	297	257	284	2	2	3
	JUMLAH	9070	8664	8124	78	64	58

Jumlah Kematian bayi paling tinggi pada tahun 2021 ada di Puskesmas Salido, yaitu berjumlah 8 orang. Dari 58 bayi yang meninggal, penyebabnya antara lain BBLR, Asfiksia, Sepsis, Kelainan Bawaan, dan lainnya.

Terjadi penurunan jumlah kematian bayi dari tahun 2020 s/d tahun 2021. Yaitu dari 64 orang di tahun 2020 menjadi 58 orang di tahun 2021. Sedangkan jumlah kelahiran pada tahun 2021 adalah 8124 orang.

Berikut tabel 3.20, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi Tahun 2021.

Tabel 3.20
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	7	112,50%

Formulasi capaian indikator kinerja Angka kematian bayi

$$AKB = \frac{(D0 - \leq 1th)}{(\Sigma \text{Lahir Hidup})} \times 1000$$

Sumber data : Perbup Dejinisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Angka Kematian Bayi Tahun 2021 :	$\frac{7}{8}$	X	100%	=	112,50%
--	---------------	---	------	---	---------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Angka Kematian Bayi Tahun 2021 ditargetkan 8 dan terealisasi sebesar 7 dengan capaian kinerja sebesar 112,50%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah : Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 3.21
Angka Kematian Ibu (AKI)
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021

Indikator	2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Ibu (AKI)	94/100.000 KH	92.3/100.000 KH	104,02%	92/100.000 KH	105/100.000 KH	93%	100/100.000 KH	172/100.000 KH	28%
/ 100.000 KH	8 org	6 org		6 org	9 org		10 org	14 org	

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Angka Kematian Ibu dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu dari 105/100.000 KLH pada tahun 2021 naik menjadi 172/100.000 KLH, pada tahun 2021 dari 8124 orang Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu pada Kabupaten Pesisir Selatan ini berada dibawah target AKI RPJMN Tahun 2024 yakni 183/100.000 KLH. Begitu juga jika dilihat dari jumlah ibu yang meninggal terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 9 orang pada tahun 2021 menjadi 14 orang pada tahun 2021. Angka Kematian Ibu di KabupatenPesisir Selatan tersebar di beberapa Puskesmas seperti pada tabelberikutini :

Tabel 3.22
JumlahKematian Ibu per Puskesmas
KabupatenPesisir Selatan Tahun 2019-2021

NO	PUSKESMAS	JumlahKelahiran			JumlahKematian Ibu		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Barung2 Belantai	414	397	320	0	0	1
2	Tarusan	517	515	482	0	1	1
3	Pasar Baru	415	413	389	0	1	1
4	Koto Berapak	350	333	321	0	0	0
5	Asam Kumbang	102	122	120	0	0	0
6	Salido	723	637	603	1	1	2
7	Lumpo	193	212	189	0	0	0
8	Pasar Kuok	390	383	318	0	1	0
9	IV Koto Mudik	202	171	168	0	0	0
10	Surantih	1016	984	989	0	1	1
11	Kambang	762	746	698	1	0	0
12	Koto Baru	343	273	264	0	0	1
13	Balai Selasa	543	543	492	1	1	2
14	Air Haji	915	888	796	1	0	3
15	Air Pura	372	347	477	1	1	0
16	Indera Pura	546	501	309	1	0	1
17	Tapan	257	271	270	0	0	0
18	Rahul	283	278	277	1	1	1
19	Tanjung Beringin	429	393	408	0	0	0
20	Tanjung Makmur	297	257	284	0	1	0
	JUMLAH	9070	8664	8124	6	9	14

Jika dilihat dari jumlah kematian ibu yang ada di Puskesmas se KabupatenPesisir Selatan, dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2021 sebanyak 14 orang, terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Kasus Kematian Ibu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 2 (dua) orang disebabkan oleh Pendarahan, 3 (tiga) orang

disebabkan oleh Hipertensi dalam Kehamilan, 1 (satu) orang disebabkan oleh infeksi nifas, dan 2 (dua) orang disebabkan karena Covid-19 serta 6 (enam) orang lainnya disebabkan oleh Malaria Serebral, Lupus Erythematosus, Trombo Emboli, Vertigo Central, Leukemia dan Kelainan Jantung

Berikut tabel 3.23, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu Tahun 2021.

Tabel 3.23
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kematian ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	100	172	28%

Formulasi capaian indikator kinerja Angka Kematian Ibu

$$AKI = \frac{JKI}{JLH} \times 100.000$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Angka Kematian Ibu Tahun 2021 : } \frac{172}{100} \times 100\% = 28\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Angka Kematian Bayi Tahun 2021 ditargetkan 100 Per 100.000 KH dan terealisasi sebesar 172 Per 100.000 KH dengan capaian kinerja sebesar 28%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

3. Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat.

Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak. Berikut data prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan 3 tahun terakhir:

Tabel 3.24
Realisasi Prevalensi Stunting
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2019	2020	2021
1.	Prevalensi stunting	persen	12,00	11,8	12,3

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa data prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 terealisasi sebesar 12% kemudian turun menjadi 11,8% pada tahun 2020. Namun kondisi ini pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 12,3%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Rendahnya capaian Kesehatan anakbalita (0-59 bulan) selama periode pandemic tahun 2020, sehingga berdampak pada kegiatan program Kesehatan anak pada tahun 2021.
2. Balita dengan imunisasi dasar lengkap (IDL) Sebagian besar tidak dibawa oleh orang tuanya untuk dilakukan stimulasi, Deteksi dan intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sebagai salah satu pelayanan yang semestinya didapatkan oleh balita.
3. Masih rendahnya kualitas Puskesmas dalam manajemen kegiatan-kegiatan Kesehatan masyarakat dikarenakan salah satunya kurangnya tenaga Kesehatan sebagai sumberdaya penunjang kegiatan di Puskesmas.
4. Banyaknya tupoksi yang diemban oleh pengelola program yang ada di Puskesmas.
5. Kegiatan penanggulangan dan vaksinasi covid-19 yang mengganggu pelaksanaan kegiatan lainnya yang ada di Puskesmas.

Berikut tabel 3.25, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2021.

Tabel 3.25
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Stunting
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	persen	11,6	12,3	94

Formulasi capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting

$$\text{PAB(2)SPstunting} = \frac{\text{JPKKJAB(2)SPstunting}}{\text{JAB(2)}} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2021 ditargetkan 11,6% dan terealisasi sebesar 12,3 % dengan capaian kinerja sebesar 94%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

4. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (morbiditas) merupakan indikator penting yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan program yang bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah. Angka kesakitan ialah jumlah kejadian suatu penyakit yang dirumuskan sebagai jumlah anak yang sakit per 1000 anak yang bisa terkena penyakit. Angka ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan program pemberantasan penyakit, dan sanitasi lingkungan serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan.

Untuk mengetahui angka kesakitan penduduk, data dapat bersumber dari sarana pelayanan kesehatan yang diperoleh dari laporan rutin yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dalam pengumpulan data angka kesakitan, terdapat dua ukuran utama yang terdiri dari angka insidensi maupun angka prevalensi.

Berikut data angka kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan selama 3 tahun terakhir:

Tabel 3.26
Realisasi Angka Kesakitan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2019	2020	2021
1. Angka Kesakitan	persen	16,85	16,57	16,57*

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa angka kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan 2 tahun terakhir mengalami penurunan dimana tahun 2019 angka kesakitan ini adalah 16,85% dan pada tahun 2020 angka ini menjadi 16,57. Pada tahun 2021 angka kesakitan masih menggunakan data tahun 2020 karena data susenas untuk angka kesakitan ini belum dipublikasikan oleh BPS.

Berikut tabel 3.27, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kesakitan Tahun 2021.

Tabel 3.27
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kesakitan
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kesakitan	persen	16,28	16,57	98

Formulasi capaian indikator kinerja Angka kesakitan

$$AM = \text{JPKK/JP} \times 100\%$$
$$AM = (\text{Angka Kesakitan})$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Angka Kesakitan Tahun 2021 ditargetkan 16,28% dan terealisasi sebesar 16,57% dengan capaian kinerja sebesar 98%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Sasaran 5 : Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.28 berikut ini:

Tabel 3.28
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	75	64.7	86.27
Rata-rata Capaian					86,27

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 5 sebesar 86,27%. Pencapaian sasaran strategis 5 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan

Hak atas kesehatan adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hak-Hak dalam Kesehatan yaitu:

- Hak memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;

- Berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;

Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat.

Tabel 3.29
Realisasi indikator Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan Tahun 2019 s.d 2021

	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2019	2020	2021
1.	Persentasemasyarakat yang terlindungihaklayanankesehatan	persen	69,98	70,19	64,70

Dari table diatas realisasi tahun 2020 ada peningkatan persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan Kesehatan dibandingkan dengan tahun 2019, atau terjadi peningkatan persentase peserta JKN-KIS di KabupatenPesisir Selatan yaitu dari 69,98% tahun 2019 meningkat menjadi 70,19% tahun 2020. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah ke pesertaan JKN-KIS di KabupatenPesisir Selatan menjadi 64,70%.

Penurunan ini disebabkan oleh terbitnya Permensos No. 92/HUK/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Akibat dari Permensos tersebut pengurangan kuota peserta PBI JKN-KIS dari anggaran APBN di kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebanyak 50.000 jiwa. Tujuan dari Permensos ini adalah untuk pembersihan data peserta yang ganda, meninggal, yang sudah mampu dan NIK yang tidak update untuk divalidasi dan verifikasi oleh Dinas Sosial PPrAKabupatenPesisir Selatan.

Berikut tabel 3.30, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2021.

Tabel 3.30
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	75	64.7	86.27



Formulasi capaian indikator kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan

$$\frac{(\text{Jumlah peserta BPJS kesehatan} + \text{BPJS Ketenagakerjaan} + \text{JKN} + \text{Jamkesda})}{(\text{jumlah penduduk})} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\begin{array}{l} \text{Capaian Angka Persentase masyarakat} \\ \text{yang terlindungi hak layanan} \\ \text{kesehatan Tahun 2021 :} \end{array} \quad \frac{64,7}{75} \quad \times \quad 100\% \quad = \quad 86,27\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2021 ditargetkan 75 dan terealisasi sebesar 64,7 dengan capaian kinerja sebesar 86,27%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Sasaran 6 : Meningkatnya perlindungan Sosial Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.31 berikut ini:

Tabel 3.31
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 6

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	52.54	65.28	124.25
Rata-rata Capaian					124,25

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 6 sebesar 124,25%. Pencapaian sasaran strategis 6 termasuk predikat **Sangat Baik**.

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang telah memperoleh Bansos}}{\text{Jumlah keseluruhan PPKS}} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\begin{array}{l} \text{Capaian Persentase PPKS yang} \\ \text{memperoleh bansos untuk pemenuhan} \\ \text{kebutuhan dasar Tahun 2021 :} \end{array} \quad \frac{64,7}{75} \quad \times \quad 100\% \quad = \quad 86,27\%$$

1. **Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar**

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

- 1) Anak balita terlantar
 - a) terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
 - b) berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
 - c) kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
 - d) Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
 - e) Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
 - f) Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang
- 2) Anak terlantar
 - a) berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b) anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c) anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- 3) Anak yang hadapan dengan hukum
 - a) disangka;
 - b) didakwa; atau
 - c) dijatuhi pidana
- 4) Anak jalanan
 - a) menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempattempat umum; atau
 - b) mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempattempat umum.
- 5) Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
 - a) Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
 - b) Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
 - c) Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
 - d) Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- 6) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
 - a) anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - b) sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
 - c) pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
 - d) dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
- 7) Pengemis
- 8) Gelandangan
- 9) Pemulung

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial memperoleh Bantuan Sosial diantaranya Bantuan Program PKH, Program Sembako, Bantuan Iuran dan lain-lain untuk pemenuhan kebutuhan dasar baik dari kemeterian sosial, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Capaian yang diperoleh dengan membandingkan jumlah bantuanyang diperoleh masyarakat dengan jumlah masyarakat yang terdata dalam DTKS.

Faktor keberhasilan Pencapaian Target Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sangat ditunjang oleh bantuan yang berasal dari kemeterian Sosial Berupa bantuan Sembako, Bantuan Program PKH dan bantuan Iuran PBI APBN

Tabel 3.32
Data Perkembangan Realisasi PPKS yang memperoleh Bantuan
Tahun 2019 s.d. 2021

Uraian	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
1. Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	50.85%	51.93%	65,28%

Program pendukung pencapaian indikator Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar antara lain;

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Penanganan Bencana

Sasaran 7 : Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.33 berikut ini:

Tabel 3.33
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 7

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	86.5	81.7	94.45
2.	Pengeluaran per kapita	Rp./org/thn	9,325,000	9.270.000	100,59
Rata-rata Capaian					97,52

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 7 sebesar 97,52%. Pencapaian sasaran strategis 7 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya baik secara absolut maupun relative terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mencakup kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, aroma dan cita rasa. Defenisi PPH konsumai adalah proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keberagaman pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Jumlah skor PPH konsumsi maksimal 100.

Secara umum kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan 2021 semakin baik dan kondusif, dan kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) juga mengalami kenaikan. Urusan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021:

Tabel 3.34
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Pola Pangan
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Skor Pola Pangan Harapan	persen	86.5	81.7	94.45

Formulasi capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan

PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021 :	$\frac{81.7}{86,5} \times 100\% = 94,45\%$
---	--

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021 ditargetkan 86,5% dan terealisasi sebesar 81,7% dengan capaian kinerja sebesar 94,45%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Berdasarkan hasil capaian Skor PPH menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin baik. Namun, kondisi saat ini, konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam ditunjukkan dengan masih tingginya konsumsi padi-padian, dan rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian.

Kelembagaan pemasaran bahan pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen dan sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik. Selain itu masih terdapat kelembagaan pemasaran yang dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan sistem yang adil diantara pelakunya. Selanjutnya informasi harga pangan sangat diperlukan oleh produsen yaitu untuk melihat kapan memproduksi bahan pangan tersebut melalui pengaturan pola tanam, melihat peluang pasar yang ada, dan memperhatikan gejolak harga yang terjadi, sedangkan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan antisipasi terjadinya gejolak harga pada saat-saat tertentu. Dengan demikian diperlukan penataan jaringan informasi harga pangan tersebut, sehingga informasi harga sampai ke tangan produsen dan pemerintah tepat waktu.

Perkembangan skor pola pangan harapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 3.35 dibawah ini:

Tabel 3.35
Perkembangan Ketersediaan Pangan, Konsumsi Pangan dan
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2021

No	Uraian	Satuan	Kabupaten		
			2019	2020	2021
1.	Ketersediaan Energi	kcal/kapita/hari	5,193.00	5,321	144
2.	Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	69.91	83.45	65
3.	ketersediaan pangan utama	kg/kapita/tahun	153.67	153.67	144
4.	Konsumsi Energi	kcal/kapita/hari	2,327.00	2,249.66	
5.	Konsumsi Protein	gram/kapita/hari	61.90	60.29	
6.	Skor Pola Pangan Harapan	%	84.00	86.40	81.7

Dari angka tersebut terlihat dimana tingkat keragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan relatif masih rendah. Hal ini disebabkan masih tingginya konsumsi kelompok padi-padian khususnya beras, kemungkinan disebabkan oleh pola makan masyarakat yang masih tergantung pada beras sebagai sumber energi dan didukung oleh produksi dan ketersediaan beras yang cukup tinggi,

sedangkan konsumsi 8 (delapan) kelompok pangan lainnya baik kuantitas, kualitas maupun tingkat keragamannya relatif masih kurang dan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masih rendah.

2. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya be

Pengeluaran Per Kapita sebagai salah satu komponen pendukung capaian IPM, pada tahun 2021 terealisasi sebesar 13.250.580rupiah/orang dari target 9.325.000 rupiah/ orang, capaian kinerjanya sebesar 57,90 persen. Beberapa faktor yang mendorong meningkatnya pengeluaran per kapita diantaranya adalah bertambahnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kebutuhan dan tingkat inflasi. Bertambahnya pendapatan akan mendorong kemampuan daya beli yang akan menstimulasi peningkatan konsumsi masyarakat. Konsumsi pokok yang paling dibutuhkan masyarakat adalah bahan pangan. Harga bahan pangan dipengaruhi ketersediaan barang atau keseimbangan tingkat permintaan dan penawaran. Bila terjadi kesenjangan antara tingkat permintaan dan penawaran maka akan mengakibatkan inflasi harga barang. Semakin tinggi kesenjangan maka akan semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan akan berakibat pada bertambahnya pengeluaran masyarakat untuk memberi barang-barang yang dibutuhkannya. Konsumsi merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tingkat konsumsi masyarakat akan turut menentukan kecepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan. Hal yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan ekonomi harus berimbangan dengan terciptanya pemerataan pendapatan. Artinya pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja baru, pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 menunjukan pertumbuhan dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang berkolerasi dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka, mengecilnya kesenjangan pendapatan sehingga menurunkan tingkat kemiskinan. Terjadi peningkatan pendapatan berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi/pengeluaran masyarakat tapi tingkat inflasi relatif kecil dan terkendali, ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi lebih baikli.

Tabel 3.36
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengeluaran perkapita	Rp./org/thn	9,325,000	9.270, 000	100,59

Formulasi capaian indikator kinerja Pengeluaran Perkapita

$$Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Pengeluaran Perkapita Tahun 2021 :	$\frac{Rp.9,270,000}{Rp.9,325,000} \times 100\% = 100,59\%$
--	---

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2021 ditargetkan Rp. 9,325,000 dan terealisasi sebesar Rp. 9,270,000 dengan capaian kinerja sebesar 100,59%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Sasaran 8 : Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 8 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.37 berikut ini:

Tabel 3.37
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 8

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	200,000,000,000	1.767.753.324.797	883,88
Rata-rata Capaian					883,88

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 8 sebesar 883,88%. Pencapaian sasaran strategis 8 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Nilai Investasi swasta dan masyarakat

Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal. Sedangkan nilai investasi itu sendiri yaitu (investment value) adalah nilai dari suatu perusahaan atau saham (business interest) atau kepentingan dalam perusahaan yang bersifat spesifik terhadap seorang investor, didasarkan pada atau terkait dengan persyaratan tertentu dari seorang atau kelompok investor.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, nilai investasi yang ada sekarang merupakan nilai investasi swasta sementara untuk nilai investasi masyarakat belum ada dilakukan penghitungan. Berikut perkembangan nilai investasi swasta di Kabupaten Pesisir Selatan 3 tahun terakhir dari tahun 2019 s.d. 2021:

Tabel. 3.38
Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019 s.d. 2021

No	Tahun	Uraian		Total nilai investasi
		Swasta	Masyarakat	
	2019	433.866.545.317	Nihil	433.866.545.317
	2020	704.435.368.737	Nihil	704.435.368.737
	2021	1.767.753.324.797	Nihil	1.767.753.324.797

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan nilai investasi di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain;

a) Tingginya kualitas Pelayanan Perizinan

Kualitas pelayanan perizinan merupakan salah satu indikator untuk pencapaian nilai investasi baik swasta dan masyarakat. Hal ini dapat tercapai jika tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan online dan terkelolanya Data Perizinan secara terintegrasi.

b) Iklim Investasi yang kondusif

Perbaikan iklim investasi dapat mendorong perbaikan perekonomian utamanya dalam mendorong percepatan implementasi layanan investasi. Upaya yang dilakukan dengan memberikan kemudahan investasi, kepastian hukuman dan jaminan keamanan. Ini dapat dilakukan dengan terus melakukan perbaikan regulasi yang telah dilakukan.

c) Tingginya peran serta masyarakat dan swasta dalam dunia usaha dan investasi

Kemudahan dalam pengurusan perizinan membuat masyarakat dan swasta bergairah untuk berinvestasi dan didukung iklim investasi yang kondusif.

Adapun program pendukung dalam pencapaian target indikator nilai investasi swasta dan masyarakat pada tahun 2021 yaitu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran 9 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 9 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.39 berikut ini:

Tabel 3.39
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 9

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliun Rp.	3.55	3.60	101.41
2.	Nilai PDRB Sektor Industri (ADHK)	Milyar Rp.	703.61	725.44	103.10
Rata-rata Capaian					102,26

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 9 sebesar 102,26%. Pencapaian sasaran strategis 9 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)

Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian termasuk indikator yang mempunyai peran penting dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 karena peran sektor pertanian ini semakin penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian pada negara berkembang dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial. Ada 4 (empat) kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan dan pembangunan yaitu:

1. Sektor pertanian merupakan ekspansi dari sektor ekonomi lainnya baik dari sisi permintaan sebagai sumber pemasok makanan yang secara kontinyu mengikuti pertumbuhan penduduk
2. Sektor pertanian berperan sebagai sumber permintaan domestik bagi produk produk sektor ekonomi dalam memberikan kontribusi pasar
3. Sebagai sumber modal untuk investasi, karena proses pembangunan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja dari pertanian ke industri
4. Sebagai sumber surplus neraca perdagangan, baik lewat ekspor hasil hasil pertanian maupun dengan peningkatan produksi pertanian

Terkait dengan capaian Nilai PDRB Sektor pertanian tahun 2021, dalam laporan kinerja ini akan dijabarkan dalam beberapa sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi terhadap nilai PDRB tersebut. Nilai PDRB itu sendiri dihitung oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan metoda-metoda tertentu dengan beberapa faktor yang menjadi tolak ukur. Namun demikian ada beberapa indikator yang dapat digambarkan untuk menjawab pencapaian indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian yang berkaitan langsung dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut indikator indikator sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi diantaranya pada tabel 3.40 berikut ini:

Tabel 3.40
Capaian indikator kinerja Sub Sektor Pertanian

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan produksi utama				
	a. Padi	ton	181,858	144,382	79.39
	b. Jagung	ton	137,743	189,636	137.67
	c. Kelapa Sawit	ton	341,147	331,548	97,19
	c. Daging	kg	5,000,000	6,248,227	124.96
	d. Telor	kg	2,000,000	2,249,320	112.47
	e. Ikan	ton	48,167.24	49,641.00	103.06

Peningkatan Produksi Utama

1. Produksi Padi

Padi merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga menjadi salah satu komoditi unggulan dalam pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021. Pada tahun 2021 ini target produksi padi sebesar 181.858 ton realisasi capaiannya sebesar 144.382 ton atau sebesar 79,39% dengan predikat **Baik**. Jika dibandingkan produksi padi tahun 2020 sebesar 382.838,81 ton tingkat capaian produksi padi tahun ini hanya mencapai 37,71% atau hanya sebesar 144.382 ton. Faktor penyebab tidak tercapainya produksi padi adalah sebagai berikut :

a. Adanya Koreksi Luas Lahan Sawah di Kabupaten Pesisir Selatan

Pada Tahun 2019 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia merevisi dan menetapkan Luas Baku Sawah (LBS) seluruh Indonesia. Tahun 2021 dan seterusnya penghitungan luas panen dan produksi padi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Luas Baku Sawah (LBS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia tersebut, luas baku sawah yang dikeluarkan BPS Kabupaten Pesisir Selatan dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tidak digunakan lagi.

Tabel 3.41
Perbandingan Produksi Padi Kab./Kota Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	PRODUKSI (TON)		
		2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Mentawai	5.390,00	1.261,78	926,00
2	Kab. Pesisir Selatan	343.824,00	382.839,00	144.382,00
3	Kab. Solok	325.360,00	307.084,12	160.964,00
4	Kab. Swl Sijunjung	90.324,00	93.270,44	47.750,00
5	Kab. Tanah Datar	322.682,00	309.072,82	181.660,00
6	Kab. Padang Pariaman	293.360,00	276.957,11	115.619,00
7	Kab. Agam	416.828,00	361.288,63	157.590,00
8	Kab. Lima Puluh Kota	245.289,00	258.668,35	124.162,00
9	Kab. Pasaman	186.848,00	223.951,53	127.162,00
10	Kab. Solok Selatan	112.890,00	92.782,23	55.331,00
11	Kab. Dharmasraya	68.005,00	67.248,32	22.467,00
12	Kab. Pasaman Barat	123.812,00	157.772,53	52.836,00
13	Kota Padang	86.542,00	67.078,84	43.747,00
14	Kota Solok	17.823,00	14.589,52	13.725,00
15	Kota Sawahlunto	17.926,00	14.278,11	7.666,00
16	Kota Padang Panjang	7.825,00	8.492,91	4.776,00
17	Kota Bukittinggi	5.450,00	4.932,77	3.175,00
18	Kota Payakumbuh	39.800,00	35.825,53	24.401,00
19	Kota Pariaman	26.679,00	26.187,16	10.371,00
JUMLAH (Ton)		2.736.657,00	2.703.581,69	1.298.710,00

Sumber : Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar 2021

Dari tabel 3.41 di atas dapat kita lihat bahwa produksi padi Kabupaten Pesisir Selatan berada pada urutan ke 4 (empat) terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar berada pada urutan pertama produksi padi terbesar di Sumatera Barat Tahun 2021 dengan total produksi sebesar 181.660 Ton.

b. Adanya Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Utama Pada Tanaman Padi

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor utama penyebab penurunan produksi padi di Kabupaten Pesisir Selatan.. Berdasarkan hasil rekapitulasi serangan organisme pengganggu tumbuhan utama pada komoditi padi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Hasil rekapitulasi serangan hama dan penyakit utama pada tanaman padi dapat dilihat pada tabel 3.42 dibawah ini :

Tabel 3.42
Rekapitulasi Serangan Hama dan Penyakit Utama
Pada Tanaman Padi Tahun 2019 s.d 2021
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS HAMA DAN PENYAKIT	LUAS SERANGAN (HA)			PENINGKATAN/ PENURUNAN (%)
		2019	2020	2021	
1	Wereng Coklat	408,10	1.062,20	373,95	(64,79)
2	Penggerek Batang	203,75	618,85	170,15	(72,51)
3	Tikus	408,30	611,90	152,15	(75,13)
4	Kepinding Tanah	370,30	891,25	138,75	(84,43)
5	Walang Sangit	60,85	512,20	-	(100,00)
6	Hama Putih Palsu	23,00	-	-	#DIV/0!
7	Blast	101,00	188,50	84,90	(54,96)
8	Tungro	89,75	124,25	12,30	-
9	Hawar Pelepah	59,75	48,25	-	(100,00)
Total		1.575,30	4.057,40	932,20	(77,02)

Sumber : Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 9 (sembilan) organisme pengganggu tumbuhan utama pada komoditi padi di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : wereng coklat, penggerek batang, tikus, kepinding tanah, walang sangit, ham putih palsu, blast, tungro dan hawar pelepah. Serangan OPT tertinggi terjadi pada tahun 2020, dimana luas total serangan sebesar 4.057,40 Ha. Jika dibandingkan antara tahun 2020 dengan 2021 terjadi penurunan serangan OPT sampai 77,02%. Tahun 2021 serangan wereng coklat yang terluas diikuti oleh penggerek batang dan tikus, serangan hama putih palsu dan hawar pelepah tahun 2021 ini nihil (tidak ada laporan serangan). Dalam rangka pencegahan dan

penanggulangan serangan hama dan penyakit tanaman padi disarankan kepada petugas dan petani sebagai berikut :

- a. Menanam varietas unggul yang tahan hama dan penyakit;
Saat ini sudah banyak dilepas Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW) seperti Inpari 19, Inpari 22, Inpari 22 Bantul, dll.
- b. Pergiliran varietas;
Untuk mencegah serangan hama dan penyakit tanaman padi pergiliran varietas wajib dilakukan agar terjadi pemutusan rantai serangan hama dan penyakit.
- c. Pergiliran tanaman;
Pergiliran tanaman perlu dilakukan agar dapat memutus rantai serangan hama dan penyakit
- d. Penanaman padi secara serentak; dan
Penanaman serentak dalam budidaya padi sangat dianjurkan agar bisa meminimalisir serangan hama dan penyakit tanaman padi
- e. Sanitasi areal budidaya padi.
Lingkungan budidaya yang bersih dan bebas dari inang hama dan penyakit akan mengurangi serangan hama dan penyakit tanaman padi

2. Produksi Jagung

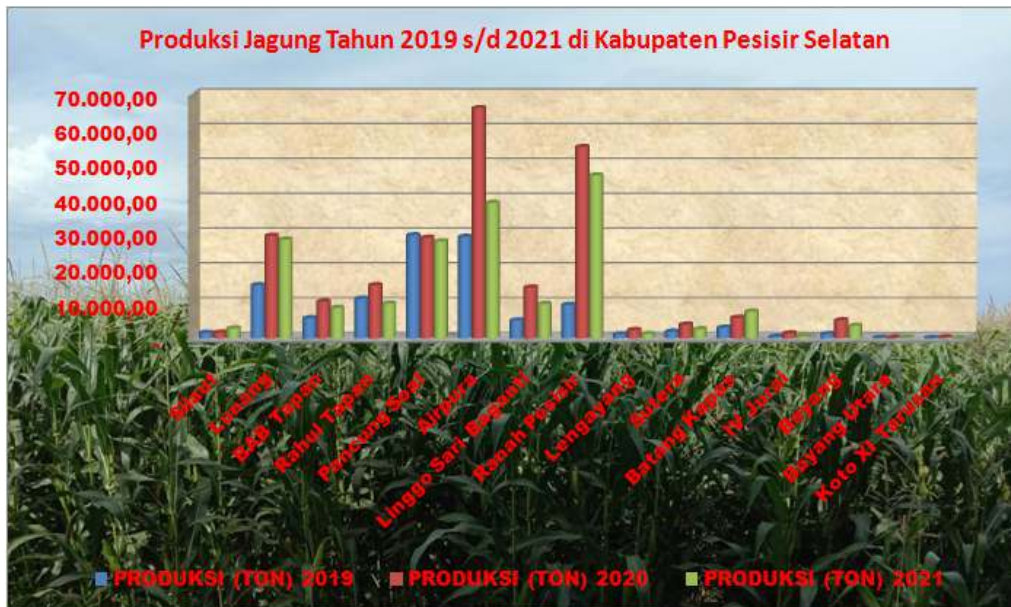
Target produksi jagung pada tahun 2021 adalah sebesar 137.743 ton dengan realisasi mencapai 189.635,60 ton atau dengan capaian 137,67%. Dibandingkan produksi tahun 2020 terjadi penurunan produksi sebesar 51.741,09 ton atau sebesar 21,44%. Penurunan produksi ini salah satunya disebabkan oleh penurunan luas panen tahun 2021 sebesar 5.942,10 Ha, dimana tahun 2021 luas panen seluas 22.177,10 Ha sedangkan tahun 2020 luas panen sebesar 28.119,20 Ha.

Tabel 3.43
Produksi Jagung Tahun 2019 s.d 2021 Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	PRODUKSI (TON)		
		2019	2020	2021
1	Silaut	1.603,97	1.650,25	2.850,16
2	Lunang	15.290,70	29.495,53	28.414,13
3	BAB Tapan	5.817,89	10.596,73	8.759,21
4	Rahul Tapan	11.419,89	15.275,12	9.973,76
5	Pancung Soal	29.632,67	28.879,60	27.881,07
6	Airpura	29.201,65	66.133,15	38.938,18
7	Linggo Sari Baganti	5.159,08	14.610,58	9.904,67
8	Ranah Pesisir	9.664,69	55.002,07	46.823,11
9	Lengayang	1.204,67	2.423,50	1.278,01
10	Sutera	1.971,04	3.994,46	2.642,51
11	Batang Kapas	3.091,01	5.950,43	7.701,24
12	IV Jurai	516,33	1.492,74	633,06
13	Bayang	1.268,03	5.234,67	3.601,61
14	Bayang Utara	113,38	76,34	176,80
15	Koto XI Tarusan	76,00	347,90	58,08
Jumlah		116.031,00	241.163,07	189.635,60

Sumber : Subbag Perencanaan dan Pelaporan, 2021

Dari tabel 3.43 diatas dapat dilihat beberapa Kecamatan sentral produksi jagung di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan produksi pada tahun 2021 ini jika dibandingkan dengan tahun 2020 seperti Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Airpura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Rahul Tapan, Kecamatan BAB Tapan dan Kecamatan Lunang.



Gambar 3.1 : Produksi Jagung Tahun 2019 s.d 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan

Dari data di atas dapat dilihat ada 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang produksi jagungnya 2 (dua) tahun terakhir cukup tinggi yaitu Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Airpura. Pengembangan jagung di Kabupaten Pesisir Selatan juga difasilitasi bantuan benih jagung hibrida dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Setiap tahun rata-rata bantuan benih jagung hibrida sebesar \pm 5.000 – 7.500 Ha yang dialokasikan hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagian besar lokasi penanaman jagung adalah dilahan bukan sawah seperti tegalan, lahan kering, dan disela-sela tanaman tahunan seperti lahan sawit usia muda dan dibawah tanaman kelapa dalam.

Tabel 3.44
Perbandingan Produksi Jagung Tahun 2019 s.d 2021
Di Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	PRODUKSI (TON)		
		2019	2020	2021
1	Kab. Mentawai	2.527,00	37,50	134,00
2	Kab. Pesisir Selatan	116.031,00	241.163,07	189.636,00
3	Kab. Solok	51.023,00	4.059,06	3.255,74
4	Kab. Swi Sijunjung	5.978,00	5.469,82	7.663,81
5	Kab. Tanah Datar	82.514,00	34.040,31	28.451,28
6	Kab. Padang Pariaman	63.125,00	35.007,31	53.462,03
7	Kab. Agam	200.279,00	106.579,64	119.623,71
8	Kab. Lima Puluh Kota	101.778,00	46.400,79	42.636,05
9	Kab. Pasaman	111.833,00	69.529,33	106.073,11
10	Kab. Solok Selatan	108.773,00	77.845,21	80.414,06
11	Kab. Dharmasraya	8.121,00	4.042,36	14.694,37
12	Kab. Pasaman Barat	329.594,00	262.284,36	276.183,84
13	Kota Padang	1.480,00	115,00	119,26
14	Kota Solok	2.351,00	903,87	700,90
15	Kota Sawahlunto	6.375,00	144,50	310,21
16	Kota Padang Panjang	76,00	-	-
17	Kota Bukittinggi	1.125,00	121,77	169,51
18	Kota Payakumbuh	6.003,00	1.533,81	1.846,77
19	Kota Pariaman	890,00	1.602,01	1.380,06
	Jumlah	1.199.876,00	890.879,73	926.754,74

Sumber : Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Pro. Sumbar, 2021

Dari tabel 3.44 di atas dapat dilihat 3 (tiga) tahun terakhir ini, Kabupaten Pesisir Selatan salah satu penyumbang terbesar kedua terhadap produksi total jagung provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Pasaman Barat.

3. Produksi Kelapa Sawit

Target produksi Kelapa Sawit Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebesar 341.147 ton realisasi sebesar 331.548,08 atau hanya mencapai 97,19%. Wujud produksi kelapa sawit yang ditetapkan di Indikator Kinerja Utam (IKU) Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 adalah Tandan Buah Segar (TBS), jika dikonversikan ke Coconut Palm Oil (CPO) maka total produksi CPO Kabupaten Pesisir Selatan khusus kelapa sawit rakyat adalah sebesar 83.413,70 ton.

Tabel 3.45
Produksi Kelapa Sawit Rakyat Tahun 2019 s.d 2021
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	PRODUKSI DALAM WUJUD TBS (TON)			KONVERSI KE CPO TAHUN 2021
		2019	2020	2021	
1	Silaut	88.696,14	70.205,07	65.192,79	16.724,88
2	Lunang	71.640,47	81.157,83	76.961,04	19.340,26
3	BAB Tapan	11.820,60	8.164,20	8.170,80	2.042,70
4	Rahul Tapan	21.707,40	51.770,40	51.796,80	12.949,20
5	Pancung Soal	37.050,00	37.125,00	37.140,00	9.285,00
6	Airpura	53.602,50	22.330,00	21.950,00	5.487,50
7	Lingo Sari Baganti	15.894,00	17.527,50	20.169,00	5.042,25
8	Ranah Pesisir	11.097,60	12.245,10	12.627,60	3.156,90
9	Lengayang	26.498,00	26.677,95	26.851,50	6.712,88
10	Sutera	6.820,00	9.966,00	9.961,60	2.490,40
11	Batang Kapas	119,00	119,00	119,00	29,75
12	IV Jurai	148,75	136,50	250,25	62,56
13	Bayang	138,60	128,70	145,20	36,30
14	Bayang Utara	-	-	-	-
15	Koto XI Tarusan	170,00	215,90	212,50	53,13
	Jumlah	345.403,06	337.769,15	331.548,08	83.413,70

Sumber : Subbag Perencanaan dan Pelaporan, 2021

Tabel 3.46
Perbandingan Produksi Kelapa Sawit Rakyat Tahun 2019 s/d 2021
di Provinsi Sumbar

No	KABUPATEN/KOTA	PRODUKSI (TON)		
		2019	2020	2021
1	Kab. Mentawai	-	-	-
2	Kab. Pesisir Selatan	86.350,75	84.442,25	83.413,70
3	Kab. Solok	69,00	71,00	58,00
4	Kab. Swl Sijunjung	62.915,00	37.487,00	9.434,00
5	Kab. Tanah Datar	-	-	-
6	Kab. Padang Pariaman	2.878,00	2.092,00	2.681,00
7	Kab. Agam	106.700,00	52.699,00	23.302,00
8	Kab. Lima Puluh Kota	11.932,00	7.714,00	13.552,00
9	Kab. Pasaman	10.700,00	10.424,00	9.782,00
10	Kab. Solok Selatan	131.464,00	19.421,00	21.790,00
11	Kab. Dharmasraya	257.069,00	66.908,00	103.226,00
12	Kab. Pasaman Barat	518.692,00	374.051,00	411.718,00
13	Kota Padang	5,00	7,00	-
14	Kota Solok	26,00	20,00	4,00
15	Kota Sawahlunto	609,00	479,00	376,00
16	Kota Padang Panjang	-	-	-
17	Kota Bukittinggi	-	-	-
18	Kota Payakumbuh	-	-	-
19	Kota Pariaman	56,00	53,00	88,00
	JUMLAH (Ton)	1.189.466	655.868	679.425

Sumber : Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar, 2021

4. Produksi Daging

Peningkatan populasi ternak yang menjadi salah satu target kinerja pada sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian tahun 2021 adalah salah satu faktor penunjang untuk pencapaian tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat tani. Selain sapi potong, itik dan ayam buras yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya peningkatan populasi ternak, secara umum Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki jenis ternak lain yang juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian.

Dibawah ini diuraikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tani melalui peningkatan populasi ternak, produksi daging, produksi telur dan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat tani yaitu kematian ternak dan penyakit zoonosis sebagai berikut :

Tabel 3.47
Jumlah Populasi Ternak Tahun 2020 s.d 2021
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	SAPI		KUDA		KERBAU		KAMBING	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Silaut	4.254	4.324	-	-	17	20	1.242	1.201
2	Lunang	2.267	2.300	-	-	167	145	1.662	1.501
3	BAB Tapan	1.279	1.310	-	-	1.693	1.719	2.829	2.867
4	Rahul Tapan	991	1.075	-	-	1.274	1.387	2.971	2.978
5	Pancung Soal	4.950	5.103	-	-	538	598	837	921
6	Airpura	4.494	4.613	-	-	735	779	752	805
7	Linggo Sari Baganti	6.015	6.083	-	-	547	624	417	595
8	Ranah Pesisir	11.179	11.347	2	2	209	225	565	556
9	Lengayang	14.429	14.423	-	-	422	478	4.228	4.360
10	Sutera	10.537	10.487	-	-	436	470	2.793	2.726
11	Batang Kapas	6.961	7.182	-	-	729	1.276	2.748	2.905
12	IV Jurai	5.200	5.330	2	2	81	58	3.077	2.755
13	Bayang	5.001	5.291	-	3	259	289	3.465	3.541
14	Bayang Utara	621	630	-	-	-	-	78	62
15	Koto XI Tarusan	6.853	7.095	-	-	891	740	989	1.010
	Jumlah (ekor)	85.031	86.593	4	7	7.998	8.808	28.653	28.783

Sumber : Bidang Peternakan, 2021

Dari tabel 3.47 diatas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) jenis ternak tersebut diatas rata-rata terjadi peningkatan populasi pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan populasi ini didorong oleh semakin meningkatnya pengelolaan ternak oleh peternak, baik itu pengelolaan ternak itu sendiri maupun lingkungan ternak berada seperti ketersediaan hijauan pakan ternak/pakan, obat-obatan, Inseminasi Buatan (IB) dan kandang yang sesuai persyaratan teknis.

Tabel 3.48
Jumlah Populasi Ternak Unggas Tahun 2020 s.d 2021
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	AYAM BURAS		AYAM RAS PEDAGING		AYAM RAS PETELUR		ITIK	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Silaut	31.849	31.920	-	-	-	30.000	999	1.003
2	Lunang	36.241	36.241	-	-	700	-	619	911
3	BAB Tapan	38.210	39.470	24.000	82.000	4.500	4.200	7.280	9.430
4	Rahul Tapan	39.115	40.180	-	-	1.300	1.200	3.725	5.210
5	Pancung Soal	37.697	37.898	245.000	245.000	-	-	2.321	2.501
6	Airpura	26.487	26.552	564.000	564.000	7.800	7.800	1.866	1.911
7	Linggo Sari Baganti	6.854	6.956	11.000	15.000	1.500	3.000	2.934	241
8	Ranah Pesisir	60.000	58.000	250.000	250.000	9.000	6.500	11.170	10.130
9	Lengayang	140.777	140.832	1.300	-	7.500	4.700	47.772	46.932
10	Sutera	43.060	42.791	272.000	272.000	9.500	12.500	5.286	5.179
11	Batang Kapas	31.726	47.315	84.000	327.000	-	-	22.649	26.100
12	IV Jurai	100.865	101.600	375.000	595.000	40.000	38.000	15.230	18.610
13	Bayang	8.700	110.163	9.000	13.000	-	-	52.794	63.505
14	Bayang Utara	101.616	7.550	-	-	-	-	550	350
15	Koto XI Tarusan	49.453	49.511	625.000	631.000	-	1.500	4.250	4.620
Jumlah (ekor)		752.650	776.979	2.460.300	2.994.000	81.800	109.400	179.445	196.633

Sumber : Bidang Peternakan, 2021

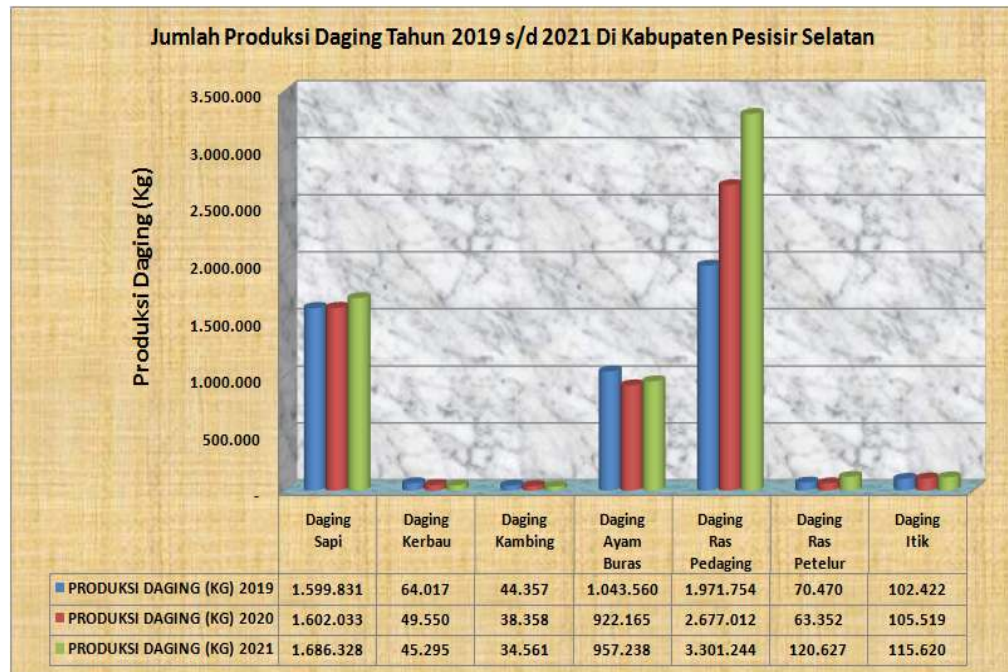
Dari tabel 3.48 diatas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) jenis ternak unggas tersebut diatas terjadi peningkatan populasi pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan populasi tertinggi yaitu ayam ras petelur sebesar 33,74% dan yang terendah adalah ayam buras sebesar 3,23%. Peningkatan populasi ini didorong oleh semakin meningkatnya pengelolaan ternak unggas oleh peternak, baik itu pengelolaan ternak itu sendiri maupun lingkungan ternak berada seperti ketersediaan pakan ternak, obat-obatan, dan kandang yang sesuai persyaratan teknis.

Tabel 3.49
Jumlah Produksi Daging Tahun 2019 s.d 2021
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS TERNAK	PRODUKSI DAGING (KG)		
		2019	2020	2021
1	Daging Sapi	1.599.831	1.602.033	1.686.328
2	Daging Kerbau	64.017	49.550	45.295
3	Daging Kambing	44.357	38.358	34.561
4	Daging Ayam Buras	1.043.560	922.165	957.238
5	Daging Ras Pedaging	1.971.754	2.677.012	3.301.244
6	Daging Ras Petehr	70.470	63.352	120.627
7	Daging Itik	102.422	105.519	115.620
Jumlah		4.896.411	5.457.989	6.260.912

Sumber : Bidang Peternakan, 2021

Dari tabel 3.49 diatas dapat dilihat bahwa ada 7 (tujuh) jenis ternak yang menjadi sumber produksi daging untuk memenuhi akan kebutuhan protein hewani di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya. Produksi daging di Kabupaten Pesisir Selatan 3 (tiga) tahun terakhir selalu meningkat, rata-rata peningkatan produksi adalah sebesar 13,09%. Peningkatan produksi ini seiring dengan peningkatan populasi ternak tersebut. Secara grafik dapat dilihat perbandingan produksi daging tahun 2019 s.d 2021 sebagai berikut :



Gambar 3.2 : Grafik Produksi Daging Tahun 2019 s.d 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan

5. Produksi Telor

Produksi telur ayam ras mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata peningkatan produksi telur ayam ras petelur adalah sebesar 6,50%, begitu juga telur itik mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 6,30% sedangkan produksi telur ayam buras mengalami rata-rata penurunan sebesar 22,02%. Walaupun populasi ayam buras mengalami peningkatan rata-rata 2,91% tapi tidak diiringi dengan peningkatan produksinya. Hal ini disebabkan banyaknya pemotongan ayam buras karena permintaan akan daging ayam buras semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya gambaran perkembangan produksi telur tahun 2019 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.50
Jumlah Produksi Telur Tahun 2019 s.d 2021
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS TELUR	PRODUKSI (KG)		
		2019	2020	2021
1	Telur Ayam Ras	744.401	816.875,00	843.474
2	Telur Ayam Buras	544.042	473.788,00	326.331
3	Telur Itik	956.230	985.153	1.079.515
Jumlah		2.244.673	2.275.816	2.249.320

Sumber : Bidang Peternakan, 2021



Gambar 3.3 : Grafik Produksi Telur Tahun 2019 s.d 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan, (Sumber : Bidang Peternakan, 2021)

6. Produksi Ikan

Produksi perikanan terjadi peningkatan dari tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2021 yaitu dari 35.479 ton menjadi 49.641 ton atau mengalami peningkatan sebesar 39,92%. Peningkatan produksi perikanan ini dikarenakan meningkatnya jumlah tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan dan bantuan alat penangkapan seperti Perahu Jukung, Mesin tempel dan long tail, Alat tangkap ikan serta alat bantu penangkapan ikan baik bersumber APBD, APBD Provinsi dan DAK.

1. Produksi Ikan

Produksi Perikanan ini didukung oleh Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap

a. Produksi Perikanan Budidaya

Realisasi produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 sebesar 14.092 ton. Dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 12.018 ton atau terjadi peningkatan 17,25%. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 melebihi dari target ini disebabkan banyaknya masyarakat yang sudah mulai berusaha budidaya ikan di air tawar dengan membuat kolam baik

swadaya maupun berkelompok. Dismaping itu bantuan benih ikan dan pakan sudah dibantu oleh pemerintah (BBI)

b. Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 sebesar **35.549** ton dan meningkat dibandingkan pada tahun 2020 sebesar **35.343** ton atau terjadi peningkatan 0,58%. Terjadinya sedikit peningkatan karena adanya wabah covid 19 sehingga menyebabkan hasil tangkapan nelayan tidak maksimal akibat dampak kesehatan yang dialami.

Tabel 3.51
Perkembangan Produksi Ikan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 201-2021

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2019	2020	2021
1	Peningkatan produksi ikan	Ton	41,346	35,479	49,641

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi fluktuasi peningkatan produksi ikan di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana pada tahun 2019 produksi ikan sebesar 41,346 ton sementara tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 35,479 ton. Sedangkan pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan produksi ikan menjadi 49,641 ton. Adapun yang mempengaruhi terjadinya penurunan dan peningkatan produksi ikan disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

- Mayoritas masyarakat nelayan berada dibawah garis kemiskinan.
- Dikeluarkannya regulasi yang mempersempit ruang gerak pendistribusian bantuan hibah kepada kelompok penerima manfaat, dimana kelompok penerima manfaat harus berbadan hukum. Dan berbentuk koperasi yang minimal telah berdiri 2 tahun.
- Rendahnya produktifitas yang disebabkan kurangnya modal untuk meningkatkan teknologi penangkapan dan pembudidayaan, serta kurangnya inovasi dalam intensifikasi dan diversifikasi produk perikanan yang dihasilkan.

Adapun solusi yang bisa ditempuh dalam mengatasi permasalahan di atas yaitu:

- Perlunya pembinaan dan pemberdayaan terhadap nelayan melalui KUB (Kelompok Usaha Bersama). Namun, pembinaan tersebut juga harus merupakan sinergi yang kuat antara stakeholders, yaitu Dinas Perikanan, Camat, dan Wali Nagari, PPL dan PPB Perikanan,
- Verifikasi yang tajam terhadap kelompok penerima manfaat dengan memperketat karakteristik calon penerima manfaat, seperti calon penerima manfaat diutamakan yang berbadan hukum atau berbentuk koperasi yang memiliki AD/ART jelas.
- Meningkatkan akses permodalan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan serta pengolah, dimana salah satu akses permodalan tersebut didapat dari agunan sertifikat tanah. Hal ini selain bermanfaat untuk menambah modal mereka, ini juga

membuat masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan mandiri dalam menambah modal tidak tergantung kepada bantuan atau hibah dari pemerintah.

- d) Perlunya regulasi yang tegas dan kuat untuk menindak atau memberikan sanksi terhadap pelaku pengguna zat-zat berbahaya pada bahan makanan (ikan segar maupun hasil olahan perikanan), dalam hal ini dapat berupa Peraturan Daerah

2. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)

Dalam rangka peningkatan Kontribusi Industri Terhadap PDRB, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan salah satu Perangkat Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Dalam upaya peningkatan Kontribusi PDRB tersebut Dinas Perdagangan dan Transmigrasi telah melakukan beberapa hal antara lain berupa:

- a. Meningkatkan keterjaminan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam hal kelayakan, keamanan, kehalalan dan higienitas melalui fasilitasi pengujian dan peningkatan kapasitas IPTEK pelaku IKM
- b. Mengikuti Promosi produk olahan di dalam dan luar daerah yang diprakarsai oleh Dekranasda sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pengembangan IKM di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk melalui program GMP (Good Manufacturing Practices) dan GKM (Gugus Kendali Mutu)
- d. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kemasan dan Pemasaran Digital
- e. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah
- f. Terbangunnya gedung sentra IKM di Nagari Carocok Mandeh Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan.

Keberadaan sentra IKM ini diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3.4 : Sentra IKM Carocok Mandeh Tarusan

Berikut data dukung terhadap perkembangan sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Tabel 3.52
Data Perkembangan Sektor Industri Tahun 2019 - 2021

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN INDUSTRI BESAR		
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Data Industri Kecil dan Menengah (IKM)	2,473	2,503	3,879
2	a Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	9,641	9,796	11,879
3	b Nilai Investasi (Rp.)	99,380,171,000	100,412,401,000	127,583,320,000
4	c Nilai Produksi (Rp.)	428,314,415,000	433,303,325,000	441,090,628,700
5	d Nilai Bahan Baku (Rp.)	212,432,726,000	216,526,551,000	236,799,132,400
6	e Omset (Rp.)	492,561,577,250	498,905,842,550	532,850,652,400

Sumber : Direktori IKM Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Pessel, 2021

Tabel 3.53
Data Fasilitas Legalitas dan sertifikat Industri Tahun 2019-2021

NO	LEGALITAS	2019	2020	2021
I	Legalitas Usaha			
1	TDI/ IUI Kecil dan Menengah	2	6	6
II	Legalitas/ Sertifikat Produk			
1	Izin Edar MD-BPOM			1
2	Sertifikat Halal	19	5	8
3	Merk Dagang HKI	22	0	4
4	Uji Laboratorium (SNI dan Nutrition Facts)	5	0	0
5	Barcode	8	0	0

Tabel 3.54
Data Fasilitas Izin dan sertifikat Industri yang terbit Tahun 2019-2021

NO	LEGALITAS	2019	2020	2021
I	Legalitas Usaha			
1	TDI/ IUI Kecil dan Menengah	2	7	4
II	Legalitas/ Sertifikat Produk			
1	Izin Edar MD-BPOM			1
2	Sertifikat Halal	19	4	8
3	Merk Dagang HKI	0	12	16
4	Uji Laboratorium (SNI dan Nutrition Facts)	5	0	0
5	Barcode	8	0	0

Tabel 3.55
Data IKM per cabang Industri Tahun 2021

NO	KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH IKM	TENAGA KERJA	INVESTASI
1	INDUSTRI MAKANAN	1,551	4,242	32,811,654,000
2	INDUSTRI MINUMAN	140	371	9,740,850,000
3	INDUSTRI PENGOLAHAN TEBAKAU	-	-	-
4	INDUSTRI TEKSTIL	134	852	3,319,374,000
5	INDUSTRI PAKAIAN JADI	277	673	4,695,676,000
6	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI	11	25	379,635,000
7	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA	112	272	1,232,682,000
8	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	-	-	-
9	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	17	61	2,235,022,000
10	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI	-	-	-
11	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA	560	2,195	25,408,180,000
12	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	4	15	35,000,000
13	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK	3	7	114,500,000
14	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	322	802	6,037,997,000
15	INDUSTRI LOGAM DASAR	-	-	-
16	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA	137	375	7,262,734,000
17	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK	-	-	-
18	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK	-	-	-
19	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL	4	8	218,800,000
20	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER	17	82	1,767,950,000
21	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA	21	56	1,576,100,000
22	INDUSTRI FURNITUR	489	1,606	28,535,206,000
23	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	80	236	2,211,960,000
24	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	-	-	-
	JUMLAH	3,879	11,878	127,583,320,000

Sasaran 10 : Menurunnya Pengangguran

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 10 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.56 berikut ini:

Tabel 3.56
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 10

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6.93	5,97	86,15
Rata-rata Capaian					86,15

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 10 sebesar 86,15 %. Pencapaian sasaran strategis 10 termasuk predikat **Sangat Baik**.

Formulasi capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

$$\text{TPT} = (\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}) / (\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}) \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 :	$\frac{5,97}{6,93} \times 100\% = 86,15\%$
---	--

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha namun usahanya belum mulai berjalan, mereka yang sengaja tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka terdiri dari :

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.

➤ **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:

a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

c. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap

sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "**baru**", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "**tindakannya nyata**" , seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.
 - Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.
 - Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka pada suatu daerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Nilai investasi
3. Angka upah minimum daerah
4. Jumlah penyaluran kredit usaha rakyat
5. Jumlah pelatihan peningkatan keterampilan/softkill

Berikut data perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Kabupaten Pesisir selatan:

Tabel 3.57
Realisasi Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran
Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.03	6.02	7,00

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan terhadap tingkat pengangguran terbuka dimana pada tahun 2018 persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 6.03% sedangkan pada tahun 2020 angka ini naik menjadi 7% atau meningkat sebesar 0,97%. Bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 maka tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 0,98%.

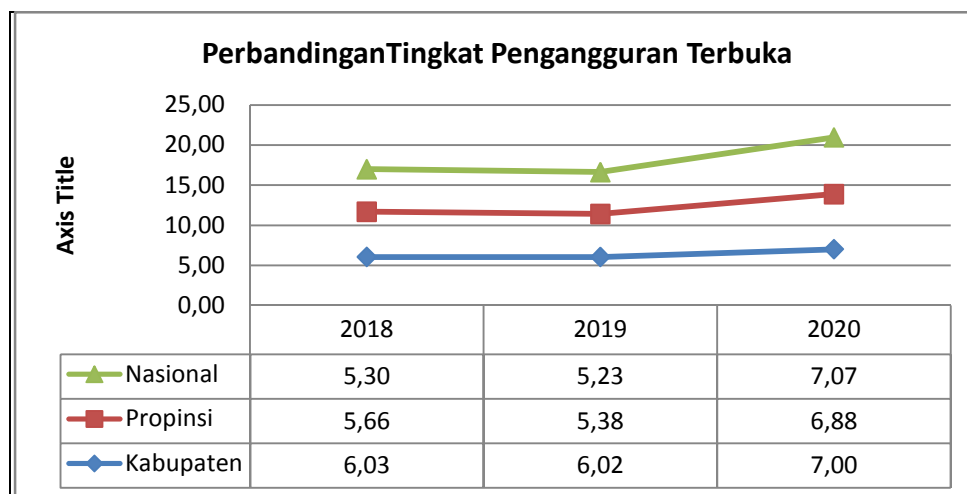
Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya kenaikan tingkat pengangguran terbuka tersebut antara lain:

- Menurunnya aktivitas perekonomian akibat adanya pandemi covid-19
- Pertumbuhan ekonomi yang rendah
- Berkurangnya nilai investasi
- Kurangnya pelatihan untuk meningkatkan softskill, bagi pencari kerja

Berikut data perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pesisir Selatan dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional:

Tabel 3.58
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2018 s.d. 2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka			
	a. Kabupaten	6.03	6.02	7.00
	b. Propinsi	5.66	5.38	6.88
	c. Nasional	5.30	5.23	7.07



Gambar 3.5 : Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan
Nasional Tahun 2018 s.d. 2020

Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas infrastruktur

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 11 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.59 berikut ini:

Tabel 3.59
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 11

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase jalan kabupaten kondisi	persen	29.55	30.78	104.16
2	Rasio konektivitas	persen	55	55	100.00
3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59.05	59.13	100.14
Rata-rata Capaian					101,43

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 11 sebesar 101,43%. Pencapaian sasaran strategis 11 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik

Persentase jalan kondisi baik diperoleh dari data inspeksi kondisi jalan tahun 2021 dan pemutakhiran *data base* jalan. Panjang jalan kabupaten adalah 2.333,18 km, ditargetkan pada akhir tahun 2021 persentase jalan kondisi baik adalah 29,55%, dengan realisasi 30,78% atau dengan capaian sebesar 104,16%. Pemutakhiran data base jalan merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik jalan, baik itu pekerjaan perbaikan/pemeliharaan/ peningkatan/kualitas jalan. Data kondisi menyajikan total panjang jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat.

Berdasarkan kondisi jalan tersebut dapat dihitung persentase jalan dalam kondisi baik. Berikut tabel 3.30, rincian jalan berdasarkan jenis dan kondisi jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021.

Tabel 3.60
Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan Jenis dan Kondisi Jalan Tahun 2019-2021

No.	Jenis dan Kondisi Jalan	Realisasi					
		2019		2020		2021	
		(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)
1.	Baik	658,64	28,23	689,47	29,55	718,11	30,78
2.	Sedang	258,34	11,07	252,28	10,18	255,56	10,95
3.	Rusak	559,00	23,96	382,85	16,41	382,64	16,40
4.	Rusak Berat	857,21	36,74	1.008,58	43,23	976,87	41,87
Jumlah		2.333,18	100,00	2.333,18	100,00	2.333,18	100,00

Sumber :LKjDinasPekerjaanUmumdanPenataanRuang, 2021

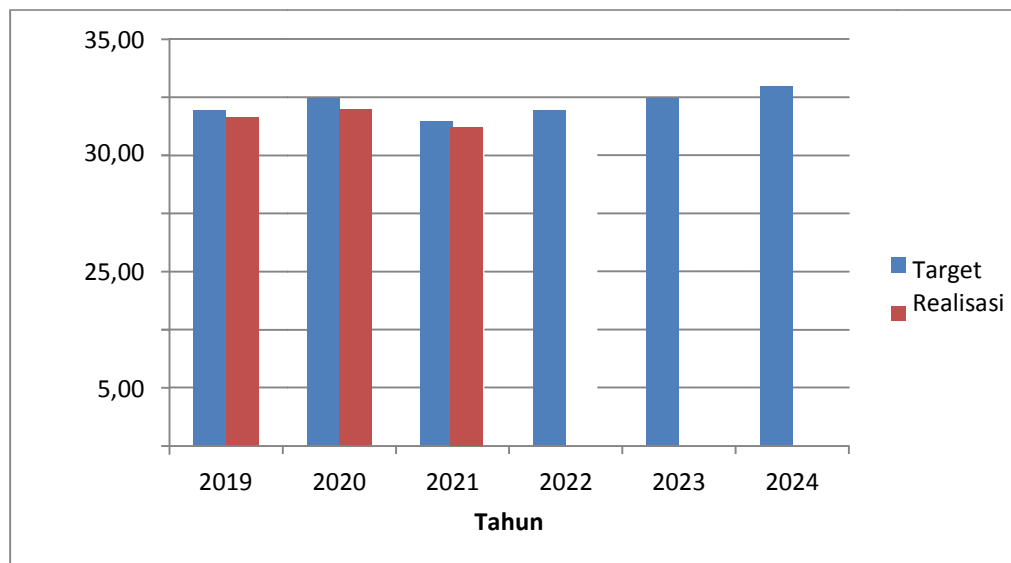
Dari tabel 3.30 di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan kondisi jalan baik dari 689,47 km (29,55%) tahun 2020 menjadi 718,11 km (30,78%) pada tahun 2021 atau meningkat sebesar (1,23%). Bertambahnya kondisi jalan baik di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan karena makin berkurangnya kondisi jalan rusak berat. Bila dibandingkan pada tahun 2020 kondisi jalan rusak berat mengalami penurunan dari 1.008,58 km menjadi 976,87km pada tahun 2021.

Tabel 3.61
Target dan Realisasi Jalan Kondisi Baik Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Target Capaian Setiap Tahun (%)	28,90	29,90	29,55	31,90
2.	Realisasi (%)	28,23	29,55	30,78	

Sumber : LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Persentase Jalan Kondisi Baik (%)



Gambar 3.6 : Target dan realisasi per tahun jalan kondisi baik Tahun 2019-2021

Capaian indikator persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik diperoleh dari data inspeksi kondisi jalan tahun 2021 dan pemutakhiran *data base* jalan. Pemutakhiran *data base* jalan dilakukan pada bulan Desember. Pemutakhiran *data base* jalan merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik jalan baik itu pekerjaan pembangunan, peningkatan kuantitas dan pemeliharaan jalan. Data kondisi jalan menyajikan total panjang jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dalam kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Berdasarkan data kondisi jalan tersebut dapat di hitung persentase panjang jalan status kabupaten dalam kondisi baik dan kondisi baik tahun 2021.

Tabel 3.62
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Jalan Kondisi Baik Tahun 2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	29,55	30,78	104.16

Sumber : LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Formulasi capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

(Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik)/(Panjang Jalan Kabupaten) x 100%

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2021 : } \frac{30,78}{29,55} \times 100\% = 104,16\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, target jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 29,55%, dengan realisasi sebesar 30,78% atau dengan capaian sebesar 104,16%. Berdasarkan pencapaian kondisi jalan baik di atas, klasifikasi penilaian indikator kinerja persentase jalan kondisi baik adalah predikat **Sangat Baik**. Hasil pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator persentase jalan dalam kondisi baik seperti pada gambar berikut :



Gambar 3.7 : Peningkatan Jalan Cumateh – Kampung Sawah, Kec. Koto XI Tarusan Tahun 2021



Gambar 3.8 : Peningkatan Jalan Simpang SMK – Bukit Batu Patah, Kec. Koto XI Tarusan Tahun 2021

Tabel 3.63
Jenis, Kondisi dan Status Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 s.d. 2021

No.	Jenis Kondisi	Status Jalan Jalan Kabupaten		
		2019 Km	2020 Km	2021 Km
A	Jenis Permukaan			
	1 Aspal	761,35	680,11	709,68
	2 Kerikil	622,83	722,01	700,38
	3 Beton	231,18	224,56	215,91
	4 Tanah	717,62	706,50	707,21
	Jumlah	2.333,18	2.333,18	2.333,18
B	Kondisi Jalan			
	1 Baik	658,64	689,47	718,11
	2 Sedang	258,34	252,28	255,56
	3 Rusak	559,00	382,85	382,64
	4 Rusak Berat	857,21	1.008,58	976,87
	Jumlah	2.333,18	2.333,18	2.333,18
C	Panjang Jalan			
	1 Kelas I	232,90	232,90	232,90
	2 Kelas Jalan II	376,50	376,50	376,50
	3 Kelas Jalan III	413,26	413,26	413,26
	4 Kelas Jalan IIIA	-	-	-
	5 Kelas Jalan IIIB	-	-	-
	6 Kelas Jalan IIIC	1.310,52	1.310,52	1.310,52
	7 Kelas Tidak Rinci	-	-	-
	Jumlah	2.333,18	2.333,18	2.333,18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan, 2021

2. Rasio Konektivitas

Konektivitas adalah terhubungnya suatu wilayah dalam suatu daerah. Rasio Konektivitas antar wilayah. Meningkatkan konektivitas suatu wilayah dapat dilakukan dengan cara membangun jalan, pelabuhan, dan pembangunan angkutan massal. Manfaat dari adanya konektivitas terjadinya peningkatan aksesibilitas antar wilayah, dimana daerah yang dulunya sulit untuk dijangkau tapi dengan adanya konektivitas daerah tersebut bisa keluar dari keterisoliran, sehingga semua aspek akan mudah dijangkau seperti, aspek pendidikan, aspek ekonomi dan juga aspek kesehatan.

Rasio konektivitas Kabupaten berdasarkan kepada:

1. Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
2. Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu -
3. Jumlah Lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas perintis ditambah lintasan komersil
4. Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu IK1 (Angkutan Jalan) IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :
5. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70).

Untuk lebih jelasnya realisasi dan capaian kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.64. dibawah ini:

Tabel 3.64
Realisasi dan Capaian Indikator Rasio Konektivitas
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio Konektivitas	persen	55	55	100

Formulasi capaian indikator kinerja Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Rasio Konektivitas Tahun 2021 : } \frac{55}{55} \times 100\% = 100\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Rasio konektivitas Tahun 2021 ditargetkan 55% dan terealisasi sebesar 55% dengan capaian kinerja sebesar 100% capaian kinerja rasio konektivitas ini adalah tergolong **sangat baik** dengan predikat **sangat berhasil**.

3. Proporsi Lahan sawah beririgasi baik

Total luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **20.907 Ha** dan jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak **249** buah DI yang merupakan kewenangan Kabupaten, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria – Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar **18.800 Ha** dan luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang lokasinya berada di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **22.540 Ha** sehingga total luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi **62.647 Ha**.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 maka dilaksanakan pemetaan terhadap areal sawah yang ada serta untuk merevisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria – Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kabupaten Pesisir Selatan telah mengusulkan DI baru sebanyak **67 DI** sehingga total DI Kabupaten Pesisir Selatan menjadi **313 DI**. Adapun luas usulan DI Kabupaten Pesisir Selatan adalah Luas baku **14.514,67 Ha**, luas potensial **10.662,42 Ha** dan luas fungsional adalah **10.269,79 Ha**. Sedang total luas fungsional Kabupaten Pesisir Selatan baik kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi dan kewenangan pusat seluas **23.837 Ha** (kesepakatan Dinas PSDA, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Badan Pertanahan Nasional Painan dan Badan Pusat Statistik Painan). Data usulan ini telah di ajukan dan diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021, Bidang irigasi mempunyai beberapa indikator yang harus dicapai dalam 5 tahun mendatang. Adapun indikator bidang irigasi tersebut adalah :

1. Indeks Pertanaman Padi (kali/tahun)
2. Indeks Kinerja Sistem Irigasi
3. Persentase Irigasi Kondisi Baik
4. Jumlah P3A yang aktif (kelompok)
5. Penanganan Bendung (unit)
 - Rehabilitasi ringan/sedang
 - Rehabilitasi berat/total
 - Pembangunan Baru

6. Penanganan saluran irigasi (m)
 - Rehabilitasi Saluran irigasi
 - Peningkatan kualitas saluran irigasi (saluran tanah menjadi pasangan)
7. Jumlah Klasifikasi irigasi yang ditingkatkan (DI)
8. Daerah Irigasi yang dilakukan OP (DI)
9. Jumlah P3A yang berbadan hukum
10. Jumlah P3A yang dilakukan pembinaan

Tabel 3.65
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Jalan Kondisi Baik Tahun 2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	%	59.05	59.13	100.14

Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Formulasi capaian indikator kinerja Proporsi lahan sawah beririgasi baik

$$\frac{(\text{Luas lahan fungsional sawah beririgasi baik})}{(\text{Luas lahan fungsional sawah keseluruhan})} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Proporsi lahan sawah beririgasi Baik Tahun 2021 : } \frac{59,13}{59,05} \times 100\% = 100,14\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, target proporsi lahan sawah beririgasi baik di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 59,05%, dengan realisasi sebesar 59,13% atau dengan capaian sebesar 100,14%. Berdasarkan pencapaian kondisi jalan baik di atas, klasifikasi penilaian indicator kinerja persentase jalan kondisi baik adalah predikat **Sangat Baik**.

Realisasi dari kinerja bidang irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indeks Pertanaman Padi

Indeks pertanaman padi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah sebesar **1,91** dan meningkat menjadi **1,95** pada tahun 2020, sedang pada tahun 2021 bertambah menjadi **1,97**. atau mengalami peningkatan sebesar **0,02** dari tahun 2020 ke tahun 2021. Peningkatan ini akan berpengaruh terhadap produksi pertanian yang merupakan mayoritas penghasilan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Indeks Kinerja Sistem irigasi merupakan indeks yang menilai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan hasil pertanian, adapun faktor tersebut adalah prasarana fisik, produktivitas (padi), sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan perkumpulan P3A/GP3A/IP3A. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah sebesar **58,81** meningkat menjadi **59,03** pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 bertambah menjadi **59,32** atau mengalami peningkatan sebesar **0,51** dari tahun 2019 ke tahun 2021.

C. Persentase Irigasi Kondisi Baik

Irigasi kondisi baik adalah kondisi sawah yang dapat terairi secara lancar dan teratur. Irigasi kondisi baik ini merupakan salah satu dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 - 2021. Adapun persentase irigasi kondisi baik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 - 2021 adalah pada tahun 2019 Persentase Irigasi kondisi baik Kabupaten Pesisir Selatan adalah **54,34** meningkat menjadi **57,05** pada tahun 2020-, pada tahun 2021 naik menjadi **59,13** atau mengalami peningkatan sebesar **2,08** dari tahun 2020 ke tahun 2021. Berikut indikator bidang irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 3.66
Indikator Bidang Irigasi Tahun 2019 - 2021

No.	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Bendung yang direhabilitasi (unit)	8	6	6
2.	Panjang Saluran irigasi yang direhabilitasi (m)	6.149	8.565	8519,97
3.	Jumlah klasifikasi Irigasi yang ditingkatkan (DI)	3	2	1
4.	Daerah irigasi yang dilaksanakan OP (DI)	20	21	7
5.	Jumlah P3A yang berbadan hukum (Klp)	20	28	19
6.	Jumlah P3A yang dilakukan pembinaan (Klp)	20	-	-

Sumber : Bidang Irigasi (data diolah), 2021

Jumlah penanganan bendung baik rehabilitasi ringan/sedang, rehabilitasi berat maupun pembangunan baru dalam rentang waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 20 unit dengan rincian tahun 2019 sebanyak 8 unit, tahun 2020 sebanyak 6 unit serta tahun 2021 sebanyak 6 unit.

**Gambar 3.9 : Bendung DI. Koto Panjang (2021)****Gambar 3.10 : Saluran Sekunder DI. Taratak Timbulun (2021)****Gambar 3.11 : Bendung DI. Taratak Timbulun (2021)**



Gambar 3.12 : Bendung DI. Sawah Rumah Gadang (2021)

Saluran irigasi sangat penting kegunaannya karena akan membawa aliran air dari bendung menuju areal sawah, oleh karena itu bidang irigasi telah melakukan rehabilitasi saluran irigasi baik rehabilitasi ringan, sedang maupun berat. Adapun panjang saluran irigasi yang telah direhab pada tahun 2019 sepanjang 6.149 m, pada tahun 2020 panjang saluran irigasi yang telah direhab adalah 8.565 m serta tahun 2021 sepanjang 8.519,97 m sehingga total panjang saluran irigasi yang direhabilitasi rentang tahun 2019 sampai dengan 2021 sepanjang 23.233,97 m.



Gambar 3.13 : Perbaikan Sayap Bendung Daerah Irigasi (DI) Damar Rumpit



Gambar 3.14 : Rehabilitasi Saluran DI Damar Rumpit

Dalam pengelolaan jaringan irigasi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi peran serta masyarakat terutama masyarakat petani harus ikut berperan aktif atau partisipasi masyarakat. Kelompok masyarakat bergabung menjadi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), antara P3A bergabung menjadi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan beberapa GP3A bersatu menjadi Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). selama tiga tahun jumlah P3A yang sudah berbadan hukum adalah sebanyak 67 kelompok dengan rincian tahun 2019 sebanyak 20 kelompok dan tahun 2020 sebanyak 28 kelompok serta pada tahun 2021 sebanyak 19 Kelompok P3A.

Selain pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pesisir Selatan, irigasi kewenangan propinsi dan pusat pada rentang tahun 2019 sampai tahun 2021 juga banyak pembangunan yang dikerjakan. Adapun pekerjaan yang cukup besar adalah Pembangunan Lanjutan Saluran Irigasi DI Kawasan Sawah Laweh di kecamatan Koto XI Tarusan dan DI Malepang Ampang Tulak di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang merupakan kewenangan pusat, dimana pembangunan bendung telah selesai dilaksanakan sedang pekerjaan saluran masih dikerjakan sampai sekarang.

Sasaran 12 : Terjaminnya kelestarian lingkungan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 12 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.67 berikut ini:

Tabel 3.67
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 12

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86.74	75.8	87.39
Rata-rata Capaian					87.39

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 12 sebesar 87,39%. Pencapaian sasaran strategis 12 termasuk predikat **Sangat Baik**.

Formulasi capaian indikator kinerja Indek Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Pencemaran Air + Indeks
Pencemaran Udara + Indeks
Tutupan Lahan

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Proporsi lahan sawah beririgasi Baik Tahun 2021 :	$\frac{75,8}{86,74}$	X	100%	=	87,39%
---	----------------------	---	------	---	--------

1. Indek Kualitas Lingkungan Hidup

Upaya mengendalikan Pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kabupaten Pesisir Selatan, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah di pahami dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (IKLH) indek ini terfokus pada media lingkungan air. Udara dan lahan, IKLH adalah perwujudan parameter Lingkungan Hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna esensi dari masing-masing indikator pada setiap Lingkungan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 IKLH dapat didapatkan sebagai berikut:

Untuk IKLH Kabupaten/Kota $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$

Perhitungan Pencapaian IKLH Tahun 2021.

$$\begin{aligned} \text{IKLH diperoleh} &= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL) \\ &= (0,376 \times 61,82) + (0,405 \times 91,86) + (0,219 \times 70,12) \\ &= 23,24 + 37,20 + 15,35 \end{aligned}$$

IKLH = 75.80 (baik)

Keterangan :

1. IKU = Indek Kualitas Udara
2. IKL = Indek Kualitas Lahan
3. IKA = Indek Kualitas Air

Status IKLH Kab. Pesisir Selatan pada angka 75.80 menunjukkan Lingkungan yang baik. Parameter yang di uji pada IKA ini adalah untuk parameter fisika pH, TSS, dan TDS sedangkan parameter kimia BOD, COD dan Phosfat . Pemantauan Kualitas Air pada sumber air dilakukan paling sedikit 1 x 6 bulan di Musim Hujan dan Musim Kemarau. Pada peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 Pasal 31 bahwa pemantauan kualitas air dilakukan dengan tujuan untuk menentukan status mutu dari air sungai yang merupakan dasar untuk evaluasi terhadap pengaruh lingkungan sekitar.

Parameter yang diukur Dinas Lingkungan Hidup Pada Tahun 2021 antara lain : DO, BOD, COD, TSS, Fosfat, Caliform E.Coli dan Pemantauan dilakukan 2x dalam setahun dibagian hulu dan hilir sungai di 8 Sungai Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.68
Titik Pantau Pengambilan Sampel Pemantauan Kualitas Air
Tahun 2021

No	Sungai	Lokasi
1	Batang Tarusan	Kec. Koto XI Tarusan
2	Batang Bayag	Kec. Bayang
3	Batang Batang Kapas	Kec. Batang kapas
4	Batang Kambang	Kec.Lengayang
5	Batang InderaPura	Kec. Pangkalan
6	Batang Tapan	Kec. BAB Tapan







Gambar 3.15 : Pengujian Kualitas Air di Laboratorium UPD Lingkungan Hidup Kab.Pesisir Selatan

Sasaran Strategis **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup** juga didukung dengan Indikator (2) Indeks Kualitas Udara dan (3) Indeks Kualitas Lahan. Kedua indeks ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Program Kegiatan yang mendukung Pencapaian sasaran strategis 1 (Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup) adalah: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Pada tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebanyak 2 (Lima) Kegiatan dengan anggaran dana sebanyak Rp. 6.876.612.050.

Pada Program ini pada tahun 2021 untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup disamping menggalakkan pengurangan pemakaian sampah Plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah anorganik di lingkungan sekitar dilakukan inovasi GELAR SAJADAH (Gerak Langkah Warga Sedekah Sampah Jadi Berkah), dimana inovasi ini adalah dengan menyediakan keranjang sebanyak 4 keranjang sampah pada tempat strategis dengan memilah jenis sampahnya sehingga masyarakat waktu melakukan sedekah sampah ke Keranjang/tong sampah telah terpilah, sampah-sampah yang telah terpilah (kertas,botol Plastik,dan sampah Ekonomis lainnya) setelah terkumpul lalu diantarkan ke Bank sampah yang ada di Nagari, Masjid dan Sekolah dan akan di catat dalam tabungan sampahnya, hasil ekonomi dari sampah ini dipergunakan untuk biaya pembangunan masjid, kegiatan di Sekolah dan Nagari, makanya di namakan sedekah sampah.

Sasaran 13 : Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 13 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.69 berikut ini:

Tabel 3.69
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 13

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1,000,000	344,297	34.43
2.	Lama tinggal wisatawan	hari	1.25	1.25	100.00
<i>Rata-rata Capaian</i>					67.21

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 10 sebesar 67,21%. Pencapaian sasaran strategis 12 termasuk predikat **Cukup Baik**.

2. Jumlah kunjungan wisatawan

Pada tahun 2021 realisasi untuk Jumlah Wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan sekitar 344.297 orang yang semula di targetkan 1.000.000 orang. Jumlah kunjungan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 jauh dari angka target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan karena adanya wabah covid-19, dimana adanya aturan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hampir diseluruh daerah sehingga terjadi penurunan kunjungan wisatawan ke obyek-objek wisata dan semakin banyaknya tempat objek wisata yang ditawarkan daerah lain serta semakin berlomba-lombanya kabupaten/kota lain dalam mengembangkan pariwisata yang ada di daerah mereka sehingga kunjungan wisatawan yang datang Kabupaten Pesisir Selatan menjadi terbagi.

Jumlah kunjungan wisatawan ini terdiri dari kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara serta wisatawan domestik. Untuk lebih jelasnya realisasi dan capaian kinerja jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.70 dibawah ini:

Tabel 3.70
Realisasi dan Capaian Indikator Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.000.000	344,297	34,43

Formulasi capaian indikator kinerja Jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata berbayar di Pesisir Selatan dalam 1 (satu) tahun

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2021 : } \frac{344.297}{1.000.000} \times 100\% = 34,43\%$$

Tabel 3.71
Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	2.069.513	177.283	344.297

Selama 3 tahun terakhir capaian jumlah Wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan yaitu, tahun 2019 realisasi sekitar 2.069.513 orang, tahun 2020 jumlah realisasi Wisatawan mencapai 177.283 orang, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 344.297 orang.

Kabupaten Pesisir Selatan terus berbenah dengan meningkatkan pengelolaan wisatanya seperti peningkatan akses jalan dan prasarana lainnya. Dengan dibukanya jalan Mandeh ini menambah destinasi baru di Kabupaten Pesisir Selatan karena pemandangan yang indah. Berikut dokumentasi objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 3.16 : Panorama Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan

Demikian juga ditempat wisata lainnya. Caracok misalnya. Selain dibangunnya sarana tempat duduk bagi pengunjung yang menghadap lautan juga sekarang dibuat taman-taman yang akan menambah keasrian dan kenyamanan pengunjung.



Gambar 3.17 : Taman Objek wisata carocok Painan

Selain peningkatan sarana dan akses wisata, Kabupaten Pesisir Selatan juga mengembangkan destinasi wisata baru. Hal ini bertujuan untuk memberikan pilihan yang lebih banyak bagi pengunjung dalam memilih tempat wisata.

3. Lama tinggal wisatawan

Lama tinggal wisatawan yang berwisata ke Kabupaten Pesisir Selatan masih statis/sama seperti tahun sebelumnya, selama 1.25 hari. Berkorelasi dengan tingkat hunian kamar yang tidak sebanding dengan ketersediaan kamar yakni sekitar 15%. Jumlah hunian kamar ini juga dipengaruhi oleh masih banyak penginapan yang tidak melaporkan jumlah kamar yang terhuni oleh para tamunya dengan berbagai alasan. Selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah even pariwisata berskala besar yang dapat mendatangkan pengunjung untuk datang ke Pesisir Selatan yang saat ini belum ada.

Pada tahun 2021 realisasi indikator Lama tinggal wisatawan sebesar 1.25 hari untuk Jumlah Wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan sekitar 344.297 yang semula di targetkan 1.000.000 orang. Jumlah kunjungan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 jauh dari angka target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga keluarnya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan semakin banyaknya tempat objek wisata yang ditawarkan daerah lain serta semakin berlomba-lombanya kabupaten/kota lain dalam mengembangkan pariwisata yang ada di daerah mereka sehingga kunjungan wisatawan yang datang Kabupaten Pesisir Selatan menjadi terbagi.

Perhitungan lama tinggal wisatawan dengan memperhitungkan kapasitas/kemampuan hunian pertahun. Kemampuan hunian tersebut seperti hotel, homestay dan wisman di Kabupaten Pesisir Selatan dapat menampung sebanyak 248.565 orang dengan jumlah penginapan sebanyak 124 buah dan jumlah kamar sebanyak 36.206 kamar. Untuk lebih jelasnya realisasi dan capaian kinerja jumlah Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.72 dibawah ini:

Tabel 3.72
Realisasi dan Capaian Indikator Lama Tinggal Wisatawan
Tahun 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Lama Tinggal Wisatawan	hari	1,25	1,25	100

Formulasi capaian indikator kinerja Lama tinggal wisatawan wisatawan

Jumlah hari yang dihabiskan wisatawan yang berkunjung ke Pesisir selatan untuk tinggal di hotel/penginapan

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2021 : } \frac{1,25}{1,25} \times 100\% = 100\%$$

Faktor-faktor yang Mendukung Keberhasilan Pariwisata :

1. Hal yang mendukung pada tahun 2021 keberhasilan bidang kepariwisataan dalam peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan baik Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara yaitu semakin banyak Pok darwis di setiap lokasi-lokasi wisata sehingga pengunjung wisata biasa di layani dengan baik
2. Promosi yang dilaksanakan sudah baik dengan melibatkan media sosial, media cetak maupun promosi langsung dari Dinas Pariwisata Provinsi dengan masuknya beberapa festival yang ada di kabupaten Pesisir Selatan di Calender Ivent Provinsi

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata secara umum yaitu :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan potensi wisata
- b. Kurangnya partisipasi investor dalam pengembangan objek objek wisata. Hal ini disebabkan karena sulitnya proses pembebasan lahan, aturan atau regulasi yang belum jelas tentang izin pengembangan usaha dalam bidang kepariwisataan
- c. Masih terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dalam bidang kepariwisataan terutama dalam penguasaan bahasa asing.

Strategi/ upaya pemecahan:

1. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan potensi wisata yang ada di sekitar mereka.
2. Memberikan berbagai kemudahan kepada pihak ketiga yang berniat menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Kemudahan yang dimaksud bisa dalam bentuk

memangkas tingkat hirarki perizinan, memberikan tarif yang jelas dan pasti mengenai biaya pengurusan perizinan, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan rumahnya menjadi home stay.

3. Mengembangkan hasil kerajinan /produksi rumah tangga untuk menjadi sovenir daerah
4. Memberikan pelatihan berbahasa asing untuk menanti tamu wisawawan asing.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis **Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia** lain :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran 14 : Berkembangnya Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 14 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.73 berikut ini:

Tabel 3.73
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 14

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	12	7.2	60.00
<i>Rata-rata Capaian</i>					60.00

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 14 sebesar 60,00%. Pencapaian sasaran strategis 14 termasuk predikat **Cukup Baik**.

Formulasi capaian indikator kinerja Jumlah Omset Ekonomi Kreatif

$$\text{Omset UEK} = \Sigma y_{1, 12, 13, \dots}$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Jumlah Omset Ekonomi Kreatif Tahun 2021 : } \frac{7.2 \text{ milyar}}{12 \text{ Milyar}} \times 100\% = 60.00\%$$

1. Jumlah omset usaha ekonomi kreatif

Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga baik dengan menggunakan APBD maupun APBN. Selain itu, untuk menindaklanjuti hasil pelatihan tersebut, Dinas Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga juga memberikan kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mempromosikan produknya, melalui kegiatan pembuatan konten promosi pariwisata yang melibatkan/ mempresentasikan produk-produk ekonomi kreatif di atraksi wisata.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian jumlah omset ekonomi kreatif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yaitu:

1. Fasilitasi ruang pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif berupa tempat berdagang seperti TIC dan Taman Spora
2. Sinergi program pelaku ekonomi kreatif dengan Pemda berupa promosi hasil usaha pelaku Ekonomi Kreatif di berbagai media
3. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif

Sasaran 15 : Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 15 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.74. berikut ini:

Tabel 3.74
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 15

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Harapan lama sekolah	tahun	13.36	13.33	99.78
2	Rata-rata lama sekolah	tahun	8.29	8.27	99.76
Rata-rata Capaian					99,77

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 15 sebesar 99,77%. Pencapaian sasaran strategis 15 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2021, target indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 13,36 tahun dan terealisasi sebesar 13,33 tahun dengan capaian kinerja sebesar 99,77%. Berikut table 3.75 target dan realisasi Harapan Lama Sekolah tahun 2021:

Tabel 3.75
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36	13,33	99,77

Formulasi capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 :	$\frac{13,36}{13,33}$	X	100%	=	99,77%
---	-----------------------	---	------	---	--------

Dari di atas dapat digambarkan bahwa harapan lama sekolah tahun 2021 ditargetkan sebesar 13,36 tahun, terealisasi sebesar 13,33 tahun atau dengan capaian 99,77%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai kategori *sangat baik*.

Dibandingkan tahun 2020 sampai 2021, Harapan lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan, seperti tabel 3.76 berikut ini:

Tabel 3.76
Perkembangan Indikator KinerjaHarapan Lama Sekolah
Tahun 2020–2021

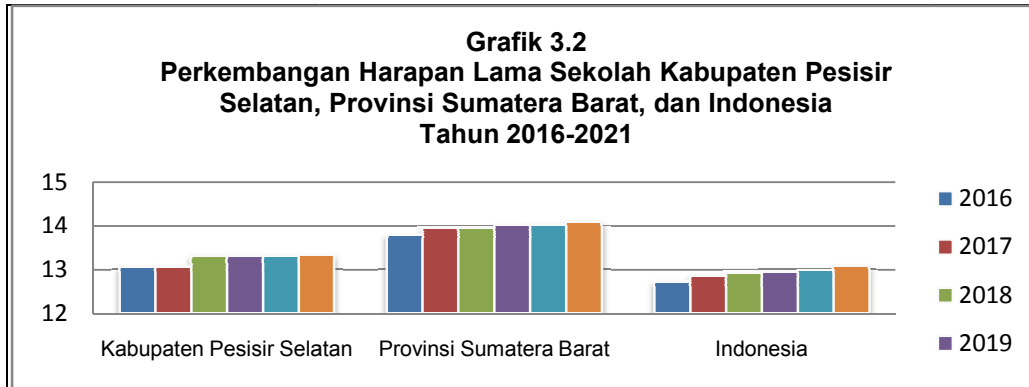
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	
			2020	2021
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,32	13,33

Berikut data realisasi Harapan lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan, provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada tahun 2019-2021:

Tabel 3.77
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir selatan
Tahun 2019 - 2021

No	Wilayah	2019	2020	2021
1	Kabupaten Pesisir Selatan	13,31	13,32	13,33
2	Provinsi Sumatera Barat	14,01	14,02	14,09
3	Indonesia	12,95	12,98	13,08

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2021



Gambar 3.18 : Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan

Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan grafik perkembangan Harapan Lama Sekolah, dimana untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 sebesar 13,05 naik menjadi 13,33 pada tahun 2021 dan untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sebesar 13,79naik menjadi 14,09 di tahun 2021 sedangkan untuk wilayah Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 menjadi 13,08 di tahun 2021. Berikut Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019–2021

Tabel 3.78
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2019–2021

Kabupaten/Kota		Tahun		
		2019	2020	2021
(1)		(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1.	Kepulauan Mentawai	12,76	12,82	12,89
2.	Pesisir Selatan	13,31	13,32	13,33
3.	Solok	13,03	13,04	13,05
4.	Sijunjung	12,36	12,37	12,38
5.	Tanah Datar	14,32	14,33	14,34
6.	Padang Pariaman	13,62	13,67	13,68
7.	Agam	13,86	13,87	13,88
8.	Lima Puluh Kota	13,28	13,29	13,30
9.	Pasaman	12,79	12,80	12,81
10.	Solok Selatan	12,70	12,71	12,72
11.	Dharmasraya	12,42	12,43	12,44
12.	Pasaman Barat	13,40	13,61	13,68
Kota				
13.	Padang	16,51	16,52	16,53
14.	Solok	14,31	14,32	14,33
15.	Sawahlunto	13,16	13,17	13,18
16.	Padang Panjang	15,05	15,06	15,07
17.	Bukittinggi	14,96	14,97	14,98
18.	Payakumbuh	14,25	14,26	14,27
19.	Pariaman	14,53	14,54	14,55
Sumatera Barat		14,01	14,02	14,09

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2021

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 rata-rata lama sekolah ditargetkan 8,29 tahun dan terealisasi sebesar 8,26. Berikut tabel 3.79 target dan realisasi rata rata lama sekolah tahun 2021:

Tabel 3.79
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,27	99,76

Formulasi capaian indikator kinerja Rata rata Lama Sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\text{Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 : } \frac{8,27}{8,29} \times 100\% = 99,76\%$$

Dari di atas dapat digambarkan bahwa rata rata lama sekolah tahun 2020 ditargetkan sebesar 8,29 tahun, terealisasi sebesar 8,27 tahun atau dengan capaian 99.76%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai sangat berhasil dengan kategori sangat baik.

Dibandingkan tahun 2020 sampai 2021, rata rata lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan, seperti tabel 3.80 berikut ini:

Tabel 3.80
Perkembangan Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2020–2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	
			2020	2021
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,26	8,27

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya, Rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi ke-11 setelah Kabupaten Tanah Datar. Berikut tabel 3.81, perbandingan rata-rata lama sekolah 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2019–2021:

Tabel 3.81
Perbandingan Rata rata Lama Sekolah
Kabupaten/Kota Tahun 2019–2021

Kabupaten/Kota		Tahun		
		2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)
Kabupaten				
1.	Kepulauan Mentawai	7.08	7.09	7,20
2.	Pesisir Selatan	8.25	8.26	8,27
3.	Solok	7.85	7.86	7,87
4.	Sijunjung	8.10	8.11	8,12
5.	Tanah Datar	8.45	8.61	8,62
6.	Padang Pariaman	7.86	8.87	7,88
7.	Agam	8.85	8.96	8,97
8.	Lima Puluh Kota	7.98	7.99	8,07
9.	Pasaman	7.86	8.09	8,10
10.	Solok Selatan	8.16	8.28	8,32
11.	Dharmasraya	8.46	8.47	8,55
12.	Pasaman Barat	8.06	8.19	8,27
Kota				
13.	Padang	11.34	11.58	11,59
14.	Solok	11.02	11.03	11,04
15.	Sawahlunto	9.97	10.17	10,32
16.	Padang Panjang	11.45	11.62	11,63
17.	Bukittinggi	11.32	11.33	11,34
18.	Payakumbuh	10.72	10.73	10,81
19.	Pariaman	10.37	10.59	10,67
Sumatera Barat		8.92	8.99	9,07

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2021

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Akses Layanan Bidang Pendidikan antara lain :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran 16 : Meningkatkan Daya Saing Pendidikan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 16 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.82 berikut ini:

Tabel 3.82
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 16

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat propinsi	orang	4	3	75.00
2	Indek Pembangunan literasi	tanpa satuan	5.9258	5.9258	100.00
<i>Rata-rata Capaian</i>					87,50

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 16 sebesar 87,50%. Pencapaian sasaran strategis 16 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi

Pada tahun 2021, target indikator Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi adalah 4 orang dan terealisasi sebesar 3 orang dengan capaian kinerja sebesar 75,00 %. Berikut table 3.83 target dan realisasi Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi tahun 2021:

Tabel 3.83
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi	Tahun	4	3	75.00

Formulasi capaian indikator kinerja Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi

Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang memperoleh penghargaan minimal tingkat provinsi

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang memperoleh penghargaan minimal tingkat provinsi tahun 2021 :	$\frac{3}{4}$	X 100%	=	75,00%
--	---------------	--------	---	--------

Dari di atas dapat digambarkan bahwa jumlag tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi tingkat propinsi tahun 2021 ditargetkan sebesar 4 orang, terealisasi sebesar 3 orang atau dengan capaian 75, 00%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai kategori **baik**.

Beberapa kompetisi yang diikuti oleh tenaga didik dan siswa antara lain Kompetisi Sains Nasional (KSN) terdiri dari 3 Bidang Studi yaitu IPA, Matematika dan IPS, sedangkan

Bidang Studi yang lolos ke tingkat nasional adalah Matematika, dimana seleksinya diadakan langsung oleh Panitia Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam bentuk **DARING**. Bagi Peserta Lomba yang Lolos ke Tingkat Nasional, maka dilakukan Pembinaan oleh sekolah bekerja sama dengan Panitia kabupaten. Seleksi Nasional juga dilaksanakan secara ON LINE. Sekolah membentuk panitia dan tim pembina lomba. Berikut beberapa lomba yang sudah diikuti oleh siswa pada tahun 2021 yaitu :

1. **KOSN (Kompetisi Olahraga Siswa Nasional) Tahun 2021**
2. **KSN (Kompetisi Sains Nasional) Tahun 2021**
3. **OPSI (Olimpiade Penelitian Siswa Nasional) Tahun 2021**

Kendala yang di hadapi yaitu dalam Take Vidio yang akan di kirim ke Provinsi yaitu perlu melakukan Take Vidio berulang kali supaya mendapatkan hasil yang maksimal serta prediksi cuaca dalam pengambilan vidio untuk jenis lomba FLS2N dengan Cabang Seni Tari, karena kegiatannya dilakukan diluar ruangan jadi kita perlu memperdiksi kapan cuaca cerah.

1. Indeks Pembangunan Literasi

Indek Pembangunan Literasi adalah sebuah instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indikator Indek Pembangunan Literasi merupakan indikator baru dalam perjanjian kinerja kepala daerah tahun 2021, dimana pencapaian indikator ini berada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan dibantu oleh beberapa dinas lainnya termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam mencapai target indikator ini telah dilakukak beberapa upaya diantaranya, bertambahnya jumlah perpustakaa, jumlah koleksi buku perpustakaan dan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan. Berikut data perkembangan indikator indek pembangunan literasi di Kabupaten Pesisir Selatan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.84
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Jenis Pengunjung, 2021

Jenis Pengunjung/ Type Visitor		Jumlah/ Total
(1)		(2)
1	Umum	31,830
2	SD	8,143
3	SMP	3,858
4	SMA	8,017
5	Mahasiswa	4,699
6	PNS/Guru	5,207
Jumah/Total		2021
		61,754
		2020
		15,258
		2019
		56,580

Tabel. 3.85
Jumlah Perpustakaan Menurut Jenis Perpustakaan dan Kecamatan
di Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Kecamatan/ Sub-District		Jenis Perpustakaan /Kind or Library					Jumlah Total	
		Perpustakaan Umum Daerah/ Regional Public Library	Perpustakaan Sekolah / School Library	Taman Bacaan Masyarakat	Perpustakaan Masjid	Perpustakaan Nagari		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Silaut		11	1	21	10	43	
2	Lunang		20	4	21	10	55	
3	Basa Ampek Balai Tapan		13	2	20	10	45	
4	Ranah Ampek Hulu Tapan		12	2	12	10	36	
5	Pancung Soal		17	-	24	10	51	
6	Airpura		16	-	16	10	42	
7	Linggo Sari Baganti		33	1	56	16	106	
8	Ranah Pesisir		30	-	46	10	86	
9	Lengayang		53	1	76	9	139	
10	Sutera		40	3	43	12	98	
11	Batang Kapas		34	3	34	9	80	
12	IV Jurai	1	46	4	46	20	117	
13	Bayang		42	-	41	17	100	
14	IV Nagari Bayang Utara		10	1	15	6	32	
15	Koto XI Tarusan		43	2	38	23	106	
Jumlah / Total		2021	1	420	24	509	182	1,136
		2020	1	404	24	509	182	1,120
		2019	1	404	20	509	182	1,116

Tabel 3. 86
Jumlah judul Buku Perpustakaan Umum Daerah
Kab. Pesisir Selatan Menurut Jenis Buku Tahun 2021

Jenis Buku/Type of Books		Jumlah Judul Buku / Number of Title	Jumlah Eksemplar / Number of Copies
(1)		(2)	(3)
1	Karya Umum	2,091	4,209
2	Filsafat	168	672
3	Agama	485	1,397
4	Kesenian, Olahraga	208	416
5	Sastra	271	542

6	Sejarah	216	840	
7	Ilmu Terapan	1,739	3,543	
8	Teknik Kesehatan	733	1,488	
9	Ilmu Sosial	817	1,652	
10	Bahasa	900	1,800	
11	Koleksi Referensi	107	419	
12	Koleksi SMA	185	743	
13	Koleksi SMP	135	427	
14	Koleksi SD	135	270	
15	Fiksi	971	2,127	
Jumah/Total		2021	9,161	20,545
		2020	8,537	19,565
		2019	8,117	18,695

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Pendidikan antara lain :

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Program Pembinaan Perpustakaan

Sasaran 17 : Meningkatnya Pengalaman Nilai nilai Agama dalam Kehidupan Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 17 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.87 berikut ini:

Tabel 3.87
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 17

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96,40	63,00	65,35
2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah dimesjid/mushola	tanpa satuan	Rendah (≤ 10 orang)	Tinggi (≥ 30 orang)	300
Rata-rata Capaian					182,68

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 17 sebesar 182,68%. Pencapaian sasaran strategis 17 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Pemenuhan Kewajiban Membayar Zakat Harta

Indikator kinerja persentase pemenuhan kewajiban membayar zakat harta yang dikelola oleh BAZ, ditargetkan 96,40% dan terealisasi sebesar 63,00% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 65,35%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **cukup berhasil** dengan kategori penilaian **cukup baik**.

Perhitungan dari potensi zakat pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp12.850.000.000,- (*dua belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp8.860.881.363,- (*Delapan milyar delapan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian zakat yang dikelola BAZ perlu terus ditingkatkan dimasa mendatang. Beberapa Potensi zakat yang dikelola oleh BAZ berasal dari PNS, karyawan swasta dan perorangan.

Tabel 3.88
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Potensi Zakat yang dikelola BAZ Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persen	96,40	63,00	65,35

Formulasi capaian indikator kinerja Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta

Jumlah zakat harta

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Persentase Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta Tahun 2021 : } \frac{63,00}{96} \times 100\% = 65,35\%$$

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ Tahun 2021 yaitu :

1. Melakukan sosialisasi yang inten sehingga tumbuh kesadaran muzaki untuk berzakat.
2. Penataan administrasi yang transparan dan akuntabel
3. Penyaluran tepat sasaran sehingga manfaatnya betul betul bisa dirasakan oleh masyarakat
4. Membuka akses bagi masyarakat yang ingin tahu seputar pengelolaan zakat
5. Terjalannya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam mengupayakan pencapaian target kinerja juga ditemukan berbagai permasalahan dan kendala diantaranya :

1. Masih ada muzaki yang membagikan zakatnya secara langsung tidak melalui BAZNAS
2. Masih ada sebagian muzaki yang enggan untuk berzakat
3. Pengetahuan dan kesadaran untuk berzakat masih kurang

4. Khususnya untuk ASN penghasilan tidak lagi mencukupi untuk dizakatkan karena sebelumnya sudah dipakai untuk keperluan lain.
5. Zakat guru sertifikasi dilingkup Dinas Pendidikan tidak lagi diambil (setor)
6. Adanya dampak dari Covid-19, sehingga banyak muzaki perorangan yang tidak menyetorkan zakatnya ke Baznas

Untuk melihat lebih jelas realisasi penerimaan BAZ Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 3.89 berikut ini :

Tabel 3.89
Realisasi Penerimaan BAZ Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019–2021

No.	Tahun	Realisasi
1	2019	Rp. 12.764.877.936, –
2	2020	Rp. 12.437.494.662, –
3	2021	Rp. 8.860.881.363, –

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi penerimaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini dapat terlihat dari realisasi tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan BAZ sebesar Rp.327.383.274,–. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp.3.576.613.299,–. Adapun salah satu faktor terjadinya penurunan ini adalah adanya pengaruh wabah covid-19 yang melanda seluruh daerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat secara global.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Pesisir Selatan dalam membayar zakat cukup tinggi dan potensi zakat yang menjadi target cukup besar. Namun karena disebabkan oleh beberapa faktor maka optimalisasi BAZ dalam menggali potensi zakat sedikit mengalami perlambatan. Perolehan zakat yang diterima oleh BAZ Kabupaten Pesisir Selatan telah dikelola untuk kegiatan– kegiatan yang bersifat sosial ekonomi kemasyarakatan yang direalisasikan dalam bentuk program program kerja. Berikut realisasi program kerja yang sudah dilaksanakan oleh BAZ pada tahun 2019–2021 sebagaimana tercantum pada tabel 3.90 berikut ini:

Tabel 3.90
Program Kerja BAZ Kabupaten Pesisir Selatan sesuai
dengan Program BAZNAS Tahun 2019-2021

No.	Program	Vol.
Tahun 2019		
1.	Pessel Makmur (Bedah/Rehab rumah)	6.840
2.	Pessel Cerdas (Beasiswa Miskin)	658
3.	Pessel Peduli	493
4.	Pessel Sejahtera (Ekonomi)	114
5.	Pessel Religius	721
Tahun 2020		
1.	Pessel Peduli	551
2.	Pessel Cerdas (Pendidikan)	2311



3.	Pessel Sehat (Biaya berobat)	944
4.	Pessel Makmur (Modal usaha)	392
5.	Pessel Religius	10794
Tahun 2021		
1.	Pessel Peduli	384
2.	Pessel Cerdas (Pendidikan)	5803
3.	Pessel Sehat (Biaya berobat)	1142
4.	Pessel Makmur (Modal usaha)	400
5.	Pessel Religius	862

Sumber data : BAZ Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat program kerja BAZ Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada program BAZNAS, dimana program-program tersebut disalurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental, sesuai dengan nilai-nilai agama, adat budaya dan kearifan lokal antara lain :

1. Program Peningkatan IMTAQ
2. Program BAZ

2. Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Masjid/Mushola

Indikator kinerja Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Masjid/Mushola, ditargetkan Rendah (≤ 10 orang dan terealisasi Tinggi (≥ 30 orang dengan tingkat capaian kinerja sebesar 300%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Sangat berhasil** dengan kategori penilaian **Sangat baik**.

Tabel 3.91
Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Masjid/Mushola Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Masjid/Mushola	tanpa satuan	Rendah (≤ 10 orang)	Tinggi (≥ 30 orang)	300

Formulasi capaian indikator kinerja Tingkat Partisipasi Subuh berjamaah di Masjid/Mushola

Jumlah orang yang mengikuti shalat subuh berjamaah di mesjid/mushola

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Tingkat Partisipasi Subuh berjamaah di Masjid/Mushola Tahun 2021 :	$\frac{\text{Tinggi } (>30 \text{ orang})}{\text{Rendah } (\leq 10 \text{ orang})}$	X	100%	=	300%
--	---	---	------	---	------

Adapun strategi untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pengalaman Nilai nilai Agama dalam Kehidupan Masyarakat yaitu dengan cara penguatan peran ulama, niniak mamak, bundo kanduang, cendikiawan dan generasi muda dalam pengembangan dan penerapan nilai-nilai ABS-SBK. Strategi ini didukung oleh beberapa arah kebijakan antara lain Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, pemangku adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat, Peningkatan Pelaksanaan Event event keagamaan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama, lembaga sosial keagamaan dan dan lembaga adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat.

Di Kabupaten Pesisir Selatan mesjid yang aktif dalam mengelola kegiatan keagamaan termasuk subuh berjamaah sebanyak 545 mesjid, 650 mushola, 49 mushola pendidikan sekolah, 17 mushola perkantoran yang tersebar di 15 Kecamatan.

Sasaran 18 : Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 18 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.92 berikut ini:

Tabel 3.92
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 18

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	10	100.00
Rata-rata Capaian					100.00

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 18 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 18 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional

Pada tahun 2021, target indikator Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional adalah 10 orang dan terealisasi sebanyak 10 orang dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Berikut table 3.93 target dan realisasi Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional tahun 2021:

Tabel 3.93
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional	Tahun	10	10	100.00

Formulasi capaian indikator kinerja Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional

Jumlah pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Jumlah pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional tahun 2021 :	$\frac{10}{10}$	X	100%	=	100%
--	-----------------	---	------	---	------

Faktor keberhasilan pencapaian Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional:

1. Faktor bidang pendidikan
2. Faktor kemajuan teknologi
3. Faktor internal/individu (diri sendiri)
4. Faktor eksternal (guru, pemerintah)

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Peran pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat diragukan lagi. Karena merekalah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa dan negara. Dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai agent of change (agen perubahan). Pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang memeloporinya. Namun, pemuda Indonesia dewasa ini telah banyak kehilangan jati dirinya, terutama dalam hal wawasan kebangsaan dan patriotisme (cinta tanah air) Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan adanya rethinking (pemikiran kembali) dan re-inventing (penemuan kembali) dalam nation character.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator Sasaran Strategis Meningkatkan SDM Kreatif dan Berdaya Saing antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Sasaran 19 : Terwujudnya Keluarga Bahagia

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 19 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.94. berikut ini:

Tabel 3.94
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 19

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Persen	0,00085	0,00053	62,35
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	90.5208	90.5339	100.01
Rata-rata Capaian					81,18

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 19 sebesar 81,18%. Pencapaian sasaran strategis 19 termasuk predikat **Baik**.

1. Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap jumlah keluarga

Temuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diawali dari laporan masyarakat ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditindaklanjuti oleh kasi pemenuhan dan perlindungan anak, bekerjasama dengan kepolisian, dilakukan pendampingan kasus anak baik sebagai pelaku dan korban dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Pada tahun 2021, target indikator Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga adalah 0,00085% dan terealisasi 0,00053% dengan capaian kinerja sebesar 62,35%. Berikut table 3.95 target dan realisasi indikator kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga tahun 2021:

Tabel 3.95
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Persen	0,00085	0,00053	62,35

Formulasi capaian indikator kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga

$$\frac{(\text{Jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan})}{(\text{Jumlah keseluruhan keluarga})} \times 100\%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga tahun 2021 :	<u>0,00053</u>	X	100%	=	62,35%
	0,00085				

Indikator kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga tahun 2021, ditargetkan 0,00085 % dan terealisasi 0,00053 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 62,35%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Cukup berhasil** dengan kategori penilaian **Cukup baik**.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian indikator Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga yaitu :

1. Adanya kegiatan pencegahan kekerasan dan pelayanan kasus terhadap anak dan perempuan dengan didampingi oleh tenaga ahli semisal psikolog
2. Kerjasama yang baik dan koordinasi yang intens dengan kepolisian, satgas PPPA dan tokoh masyarakat
3. Dukungan anggaran dari DAK non Fisik untuk pencegahan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Cakupan Ketersediaan rumah layak huni

Rumah layak huni merupakan kondisi ideal di mana bangunan tersebut memiliki kecukupan minimal dalam unsur ruang dan luas ruangan. Selain itu, juga memperhatikan kualitas material pembangunan seperti dinding, atap untuk keselamatan serta sanitasi dan air bersih yang layak untuk kesehatan bagi siapa pun yang menempatinnya.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 11/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab./Kota, maka Rumah layak huni pengertiannya adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Adapun kriteria dari rumah layak huni tersebut antara lain :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi
 - a. Struktur bawah/pondasi;
 - b. Struktur tengah/kolom dan balok
 - c. Struktur atas
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi
3. Memenuhi kecukupan luas minimum, 7,2 M²/orang sampai dengan 12 M²/orang

Berikut tabel 3.96 target dan realisasi indikator kinerja Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2021:

Tabel 3.96
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	90.5208	90.5339	100.01

Formulasi capaian indikator kinerja Cakupan ketersediaan rumah layak huni

$$\frac{(\text{Jumlah rumah layak huni})/(\text{Jumlah keseluruhan rumah}) \times 100\%}{}$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\begin{array}{l} \text{Capaian Cakupan ketersediaan rumah layak} \\ \text{huni tahun 2021 :} \end{array} \quad \begin{array}{l} 90.5339 \\ 90.5208 \end{array} \quad \times \quad 100\% \quad = \quad 100,01\%$$

Indikator kinerja Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2021, ditargetkan 90.5208% dan terealisasi 90.5339% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,01%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Sangat berhasil** dengan kategori penilaian **Sangat baik**.

Berikut perkembangan data realisasi dan capaian indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2019 s.d. 2021

Tabel 3.97
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 s.d. 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2019	2020	2021
1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	98.751	99.828	100,014

Ketersediaan Rumah Layak Huni terjadi peningkatan dari Tahun 2019 ke tahun 2020. Untuk Tahun 2021 terjadi penurunan Cakupan ketersediaan Rumah layak huni disebabkan ada validasi data Akhir Desember 2021 ditemukan data Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 11.345 unit.

Program yang mendukung sasaran 1 yaitu Pengembangan Perumahan, Program Perumahan dan Kawasan Kumuh dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Rasio rumah layak huni pada tahun 2021 ditargetkan 0,2255 dengan realisasi 0,2057 dan capaian 92,47%. $(\text{Jumlah Rumah Layak Huni}) : (\text{Jumlah Penduduk}) = (103.763 : 504.418) = 0.2057$. Untuk indikator kinerja rasio rumah layak huni capaian kinerja turun dari capaian, tahun 2020 karena terjadi validasi data RTLH tahun 2020

RTLH menjadi 11.345 dan penambahan jumlah penduduk tahun 2020 di Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021 dengan jumlah penduduk di PSDA 2020 adalah 466.423 terjadi lonjakan penambahan penduduk di PSDA 2021 menjadi 504.418 yang berpengaruh terhadap rasio rumah layak huni. Sedangkan jumlah penanganan Tahun 2021 sudah melebihi target semula 500 unit, penanganan 514 unit.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah sebagai berikut :

1. Menggiring Dana Aspirasi dan pokok pikiran anggota Dewan untuk mengalokasikan anggaran untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan membuat proposal untuk mengalokasikan Anggaran untuk Bantuan RTLH di Kabupaten Pesisir selatan
3. Adanya pearturan Bupati yang menagtur untuk Dana Anggaran Nagari untuk mengalokasikan Anggaran untuk Bantuan RTLH Minimal 2 Unit

Sasaran 20 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 20 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.98 berikut ini:

Tabel 3.98
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 20

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	tanpa satuan	56.93	56.93	100
	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	tanpa satuan	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (34) Madya (0) Utama (0)	18.68
Rata-rata Capaian					59,34

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 20 sebesar 59,34%. Pencapaian sasaran strategis 20 termasuk predikat **Cukup Baik**.

1. **Indek Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Progran Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berupaya percepatan peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan yang diukur melalui beberapa indikator, diantaranya,

angka harapan hidup, angka melek huruf, angka sumbangan pendapatan perempuan dan laki-laki maupun beberapa pengukuran lainnya.

IDG dititik beratkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Berikut tabel perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan selama 4 tahun:

Tabel 3.99
Perkembangan Indikator Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 s.d. 2020

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kab. Pesisir Selatan	57,70	55,79	56,93	56,93

Berdasarkan indikator indeks pemberdayaan gender yaitu, proporsi keterwakilan di parlemen laki laki dan perempuan, Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesioanl dan teknisi, laki laki dan perempuan dan Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi menurunnya indeks pemberdayaan gender Kabupaten Pesisir Selatan dari angka 57,70 pada tahun 2018 menjadi 56,93 pada tahun 2021 yaitu karena pengaruh indikator Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan. Hal ini disebabkan karena selama kurun waktu 2 tahun terakhir telah terjadi wabah covid-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat tidak terkecuali Kabupaten Pesisir Selatan.

Berikut target dan realisasi indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.100
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	tanpa satuan	56.93	95.41	167.59

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender

Rata-rata aritmatik dari dimensi Keterwakilan di parlemen, Pengambilan keputusan dan dimensi Distribusi pendapatan.perempuan)/(Jumlah keseluruhan keluarga) x 100%

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Indeks Pemberdayaan gender tahun 2021 :	$\frac{56,93}{56,93}$	X	100%	=	100%
---	-----------------------	---	------	---	------

Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2021, ditargetkan 56,93% dan terealisasi 56,93% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Sangat berhasil** dengan kategori penilaian **Sangat baik**.

Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan pemberdayaan gender di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Adanya Fasilitasi Organisasi Wanita yang representatif untuk pemberdayaan perempuan
2. Monitoring dan evaluasi pokja PUG
3. Sosialisasi Perempuan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

2. Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Dari 182 Nagari yang ditargetkan itu baru terealisasi sebanyak 34 Nagari atau sekitar 18,68%. Adapun yang mempengaruhi rendahnya pencapaian target indikator tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu adanya indikator tangguh bencana yang menjadi pedoman dalam menetapkan nagari tersebut dikategorikan sebagai nagari tangguh bencana.

Sesuai dengan PERKA BNPB No 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, disebutkan Bahwasanya Nagari/Desa Tangguh Bencana mempunyai 20 indikator yaitu :

- a. Adanya kebijakan/peraturan Desa (Nagari)/kelurahan tentang Penanggulangan Bencana (PB) atau Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- b. Adanya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Komunitas (RAK) dan Rencana Kontijensi (RENKON)
- c. Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB)
- d. Terbentuknya Relawan Penanggulangan Bencana (Kelompok Siaga Bencana/KSB)
- e. Adanya Kerjasama antar pelaku dan wilayah
- f. Tersedianya Dana Khusus untuk Tanggap Darurat
- g. Tersedianya Dana untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- h. Diberikannya Pelatihan untuk perangkat Desa/Nagari
- i. Diberikannya Pelatihan untuk Tim Relawan
- j. Diberikannya Pelatihan untuk Masyarakat Desa/Nagari
- k. Dilibatkannya Masyarakat Desa/Nagari Secara Aktif
- l. Dilibatkannya Perempuan dalam tim relawan
- m. Adanya Peta dan Jalur Evakuasi serta tempat untuk mengungsi
- n. Adanya Sistem Peringatan Dini (Early warning system)
- o. Dilaksanakannya Mitigasi Struktural (fisik)
- p. Terbentuknya pola ketahanan ekonomi masyarakat untuk mengurangi kerentanan mereka dalam menghadapi bencana

- q. Adanya perlindungan kesehatan kepada kelompok masyarakat yang rentan
- r. Adanya pelaksanaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mengurangi Risiko Bencana
- s. Adanya perlindungan terhadap Aset Produktif Utama pada masyarakat

Dari sekian banyaknya indikator tersebut di atas, hanya ada 2 sampai 3 indikator yang baru terpenuhi sehingga hal ini sangat mempengaruhi capaian target indikator nagari tangguh bencana. Pada tahun 2021 baru 34 Nagari yang memenuhi syarat menjadi nagari tangguh bencana.

Berikut target dan realisasi indikator kinerja Jumlah Nagari tangguh Bencana Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.101
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Nagari
Tangguh Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	tanpa satuan	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (34) Madya (0) Utama (0)	18,68

Formulasi capaian indikator kinerja Indek Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Jumlah nagari yang sudah memenuhi kriteria tangguh bencana

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Jumlah Nagari Tangguh Bencana tahun 2021 :	$\frac{34}{182}$	X	100%	=	18,68%
--	------------------	---	------	---	--------

Indikator kinerja Jumlah Nagari Tangguh Bencana tahun 2021, ditargetkan 182 Nagari dan terealisasi 34 nagari dengan tingkat capaian kinerja sebesar 18,68%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Gagal** dengan kategori penilaian **kurang baik**.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, tercantum pada tabel 3.102 dibawah ini:



Tabel 3.102
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1,405,607,338,321	1,283,185,683,621	90.51%
2.	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	6,611,151,094	6,487,171,742	98.12%
3.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	730,820,214	693,349,166	94.87%
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	77,856,079,222	60,707,437,614	77.97%
5.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	55,837,432	43,304,200	77.55%
6.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	538,613,317	302,825,357	56.22%
7.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	627,152,390	578,117,450	92.18%
8.	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	326,122,000	261,621,800	80.22%
9.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	32,821,347,862	29,547,386,583	90.02%
10.	Menurunnya Pengangguran	75,618,600	72,862,315	96.36%
11.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	126,580,745,365	115,619,498,141	91.34%
12.	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	396,646,545	360,948,796	91.00%
13.	Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di Pantai Barat Indonesia	6,738,332,525	6,336,645,061	94.04%
14.	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	3,372,126,350	3,256,992,356	96.59%
15.	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	69,494,929,889	59,979,878,396	86.31%
16.	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	1,249,129,664	991,395,920	79.37%
17.	Meningkatnya Pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	10,490,050,170	9,559,288,406	91.13%
18.	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	2,182,387,570	2,004,230,420	91.84%
19.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	8,884,277,730	8,154,144,430	91.78%
20.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	312,653,440	72,001,350	23.03%
Jumlah		1,754,951,359,700	1,588,214,783,124	90.50%

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021



Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk menunjang pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebesar Rp1,754,951,359,700,- terealisasi sebesar Rp1,588,214,783,124,- atau 90,50%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp166.736.576.577,- atau 9,5%.
- b. Sisa anggaran sebesar Rp166.736.576.577,- atau 9,5%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran

Dari 20 (dua puluh) sasaran yang telah ditetapkan, 4 (empat) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 178,76%, dengan nilai tertinggi adalah 883,88% yaitu sasaran “Meningkatnya investasi PMA dan PMDN”. Untuk nilai terendah dari 20 (dua puluh) sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah 59,34% yaitu sasaran “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri”.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 16 (enam belas) indikator kinerja berhasil mencapai dan melampaui target dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja belum mencapai target dan 3 (indikator) indikator kinerja gagal. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target adalah 190,20%, dengan nilai tertinggi adalah 883,88% yaitu indikator kinerja “Nilai investasi swasta dan masyarakat”, sedangkan indikator kinerja yang nilainya terendah 18,86% yaitu indikator kinerja “Jumlah Nagari tanggu Bencana”.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1,588,214,783,124,- atau 90,50% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp1,754,951,359,700,-. Dari 20 (dua puluh) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi” yaitu 98,12% dan terendah adalah “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri” yaitu 23,03%.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat



3. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.



BUPATI PESISIR SELATAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Painan, Desember 2021

BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	
					Sebelum	Setelah
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1.1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	WTP
		1.2.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	B	B (66,88)
		1.3.	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3209
		1.4.	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3	3 (3,0057)
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	2.1	Indeks SPBE	tanpa satuan		3,20
		2.2	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan		57
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	3.1.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan		93
		3.2.	Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan		80
4	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	4.1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000		8
		4.2	Angka Kematian Ibu	Per 1.000		100
		4.3	Prevalensi stunting	persen		11,6
		4.4	Angka Kesakitan	persen		16,28
5	Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat	5.1	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen		75
6	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	6.1	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan			52,54
7	Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	7.1	Pencapaian skor pola pangan harapan			86,5
		7,2	Pengeluaran perkapita			9.325.000
8	Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN	6.1	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.		200.000
9	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	7.1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	TriliunRp	3,70	3,55
		7.2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.		703,61
10	Menurunnya Pengangguran	8.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen		6,93
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur	9.1	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen		29,55
		9.2	Rasio Konektivitas	persen		55,00
		9.3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen		59,05
12	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	10.1	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan		86,74
13	Pesisir Selatan Menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	11.1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.400.000	1.000.000
		11.2	Lama tinggal wisatawan	hari	1,25	1,25
14	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	12.1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.		12
15	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan	13.1	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,33	13,36
		13.2	Rata-Rata Lama Sekolah'	tahun	8,27	8,29
16	Meningkatnya daya saing pendidikan	14.1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang		4
		14.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan		5,9258
17	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	15.1	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen		96,40
		15.2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan		Rendah (≤10 orang)
18	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	16.1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang		10
19	Terwujudnya Keluarga Bahagia	17.1	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen		0.00085
		17.2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak	persen		90,5208
20	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	18.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan		56,93
		18.2	Jumlah nagari tangguh bencana	nagari		Pratama (182) Madya (0) Utama (0)

Program		Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp1.126.548.450.286	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rp611.200.548.207	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp106.273.443.735	Rp113.029.047.095
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp12.683.353.296	Rp10.918.853.262
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp283.005.759.588	
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp89.381.455.385	Rp102.078.248.281
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp695.708.700	Rp596.923.500
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp194.836.591.038	
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp44.732.214.449	Rp42.214.593.885
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp13.985.190.410	Rp13.780.159.450
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp12.178.427.766	Rp12.164.979.666
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp2.020.231.713	Rp1.903.773.788
13	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp9.299.452.014	Rp9.453.705.440
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp5.863.365.052	Rp3.542.240.136
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp89.577.796.556	Rp95.137.967.298
16	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp102.999.546	Rp38.544.416
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp401.107.400	Rp117.721.816
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp17.712.778.609	
19	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp1.537.615.382	Rp438.822.458
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp14.956.661.009	
21	SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp1.032.521.538	Rp1.548.736.182
22	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp1.847.197.486	Rp9.000.400.000
23	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp1.925.067.370	Rp2.236.650.370
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Rp4.836.111.835	
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp315.179.338	Rp156.226.038
26	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp102.497.240	Rp148.005.057
27	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp26.998.992	Rp20.512.692
28	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp89.998.879.936	
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Rp260.078.000	
30	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp171.476.780	Rp3.780.120
31	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp88.601.220	Rp71.838.480
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp827.525.060	
33	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp187.157.080	Rp62.653.440
34	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp26.558.630	Rp22.455.230
35	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp18.644.030	Rp1.164.000
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Rp4.116.014.846	
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp534.351.960	Rp627.152.390
38	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp69.499.900	Rp4.997.200
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Rp11.269.367.913	
40	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp160.079.570	Rp136.033.570

41	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp698.901.920	
			Rp396.646.545
42	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp1.495.222.590	Rp1.740.640.900
43	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp14.213.850	Rp14.213.850
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp7.719.332.250	
45	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp1.608.962.650	Rp1.077.934.980
46	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp3.251.027.761	
47	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp2.763.726.503	Rp2.315.510.471
48	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp433.009.808	Rp251.651.454
49	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp11.043.567.108	
50	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp5.444.995.635	Rp5.393.335.535
51	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp887.399.870	Rp887.399.870
52	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rp15.327.401.756	
53	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp9.678.087.995	Rp9.728.450.795
54	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp103.800.000	Rp53.644.790
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp8.672.294.046	
56	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp782.664.350	Rp691.781.294
57	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp3.762.147.525	Rp3.539.899.200
58	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rp5.915.694.663	
59	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp388.525.100	Rp312.807.000
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp57.780.772	Rp55.905.772
61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Rp4.789.683.554	
62	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp114.258.570	Rp117.241.970
63	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp182.859.800	Rp182.859.800
64	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp113.373.920	Rp70.122.940
65	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	Rp9.455.471.281	
66	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp821.750.820	Rp810.950.900
67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAAHRAGAAN	Rp4.272.224.990	Rp919.456.730
68	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Rp111.270.000	
69	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp111.270.000	Rp88.770.000
70	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Rp68.841.900	
71	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp68.841.900	Rp30.438.340
72	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Rp1.152.157.922	
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp758.984.000	Rp448.990.880
74	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp213.173.922	Rp213.173.792
75	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Rp4.902.198.374	
76	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp775.583.229	Rp567.968.468
77	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Rp334.654.812	
78	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp334.654.812	Rp203.952.222
79	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp83.304.125.177	
80	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp9.097.949.201	
81	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp3.570.150.678	Rp3.247.811.816

82	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Rp6.974.406.195	
83	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp6.469.450.025	Rp6.733.581.525
84	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp96.700.000	Rp4.751.000
85	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp408.256.170	Rp981.583.310
86	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Rp33.107.622.861	
87	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp3.097.094.459	Rp2.513.776.345
88	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp7.106.402.568	Rp6.705.478.147
89	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp160.609.130	Rp188.197.400
90	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp170.671.245	Rp159.465.445
91	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp198.946.660	Rp181.345.660
92	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp4.571.501.156	Rp3.620.578.329
93	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Rp9.752.760.146	
94	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp9.402.196.030	Rp2.179.291.990
95	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp117.064.300	Rp2.955.000
96	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp18.261.793.000	
97	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp18.001.753.000	Rp15.561.824.000
98	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Rp211.940.000	Rp45.466.000
99	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Rp6.109.593.774	
100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp2.227.494.023	Rp2.090.591.929
101	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp80.361.971.910	
102	SEKRETARIAT DAERAH	Rp32.531.079.224	
103	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp6.770.350.898	Rp5.870.432.196
104	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp746.786.397	Rp632.990.188
105	SEKRETARIAT DPRD	Rp47.830.892.686	
106	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp19.041.892.620	Rp20.319.943.716
107	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp307.553.686.687	
108	PERENCANAAN	Rp6.739.745.715	
109	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp714.211.458	Rp578.991.110
110	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp783.262.816	Rp732.218.466
111	KEUANGAN	Rp291.560.460.559	
112	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp267.655.083.269	Rp260.433.903.058
113	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp838.157.943	Rp751.785.793
114	KEPEGAWAIAN	Rp6.494.869.319	
115	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp1.043.006.124	Rp1.014.187.784
116	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp2.550.246.480	
117	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp1.920.481.140	Rp1.506.980.800
118	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp208.364.614	
119	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp208.364.614	Rp121.005.154
120	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Rp8.127.458.817	
121	INSPEKTORAT DAERAH	Rp8.127.458.817	
122	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp1.514.663.040	Rp1.550.422.670
123	UNSUR KEWILAYAHAN	Rp32.071.741.259	
124	KECAMATAN	Rp32.071.741.259	
125	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp323.009.140	Rp1.216.732.640
126	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp585.894.750	Rp479.641.380
127	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp61.246.300	Rp64.726.100

128	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp423.257.100	Rp370.907.100
129	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp175.054.020	Rp190.150.530
130	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Rp1.930.788.533	
131	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp1.930.788.533	
132	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp152.852.444	Rp73.462.004
133	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp33.695.148	Rp855.000
134	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp482.153.074.958
135	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Rp121.705.379
136	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp220.281.259.653
137	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Rp10.426.306.870
138	PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rp139.192.332
139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp14.692.895.185
140	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
141	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Rp3.859.672
142	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
143	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp7.359.396.469
144	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Rp45.990.000
145	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Rp8.332.367.730
146	PROGRAM Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Rp2.062.795.980
147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp9.262.799.709
148	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN		
149	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp4.098.839.620
150	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Rp307.736.530
151	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Rp82.871.730
152	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp3.828.791.988
153	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rp161.956.000
154	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Rp421.460.140
155	PROGRAM Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Rp266.026.740
156	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Rp40.146.630
157	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		Rp35.927.490
158	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Rp35.000.000
159	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		Rp67.895.110
160	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		Rp98.263.260
161	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		Rp57.365.510
162	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		Rp75.147.020
163	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		Rp21.864.420
164	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Rp113.081.240

165	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp84.428.420
166	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp88.996.000
167	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
168	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp6.876.612.050
169	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.377.174.097
170	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp21.267.400
171	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp1.246.333.000
172	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp10.500.000
173	PROGRAM PENATAAN DESA	
174	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp24.499.000
175	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.617.637.548
176	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
177	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.775.152.624
178	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp3.959.445.729
179	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp390.303.960
180	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp1.200.000
181	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp451.979.940
182	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp3.750.035.449
183	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp380.227.578
184	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
185	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.054.495.338
186	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
187	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp100.000.000
188	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
189	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.057.141.458
190	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
191	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
192	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp7.285.513.243
193	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp723.502.120
194	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp105.177.976
195	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp20.404.076.744
196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.591.167.791
197	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp208.296.050
198	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
199	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp15.561.824.000

200	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Rp45.466.000
201	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp62.100.000
202	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp24.592.142.797
203	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp5.870.432.196
204	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	
205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp27.210.618.409
206	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	
207	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.165.681.965
208	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	
209	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
210	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	
211	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp25.193.771.230
212	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp995.054.580
213	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.327.342.979
214	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp448.115.340
215	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp6.469.091.988
216	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
217	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp28.899.129.904
218	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp35.267.000
219	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp1.443.790.819
220	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp141.537.628
221	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp1.092.566.838

Total Anggaran

Rp4.248.938.012.254

Rp1.776.429.081.896

Palnan, Desember 2021

BUPATI PESISIR SELATAN
 (Drs. RUSMA YULANWAR, M.Pd.)



Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan